



**"BUDI UTOMO : SEJARAH DAN KONGRES
PERTAMA DI YOGYAKARTA 1908",
SEBUAH KAJIAN KOLEKSI MUSEUM BENTENG
VREDEBURG YOGYAKARTA",**



Tim Penyusun :

Drs. Budiharja
V. Agus Sulistya, S.Pd
Muri Kurniawati, SIP.
Haris Budiharto, S.S
Dra. Amin Sukrilah



MUSEUM BENTENG
YOGYAKARTA

.3

D

MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA
2004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah berjalan dalam satu kesatuan tiga dimensi waktu yaitu lampau, sekarang dan yang akan datang. Kesemuanya merupakan satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau merupakan bagian dari kesatuan pengalaman kolektif bangsa Indonesia yang besar artinya dalam pemahaman sejarah nasional bangsa Indonesia. Apapun bentuknya peristiwa tersebut harus kita akui sebagai bagian dari masa lalu bangsa Indonesia. Salah satu dari peristiwa tersebut adalah peristiwa tentang berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi modern yang pertama pada tahun 1908. [DR. Suhartono, 1994 : 3]

Abad XX merupakan abad nasionalisme, artinya pada abad ini banyak negara-negara di dunia disibukkan dengan usaha-usaha mencari jati dirinya, kesadaran berbangsa mulai timbul. Di Indonesia, nasionalisme timbul murni sebagai dampak dari adanya politik kolonial di Indonesia. Praktek modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial justru menyebabkan lahirnya organisasi modern yang dimotori oleh rakyat bumi putra ini.

Runtuhnya VOC yang dinyatakan pada tanggal 31 Desember 1799 menyebabkan semua kegiatannya terutama perdagangan ditarik oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sejak saat itu kegiatan ditekankan pada eksploitasi ekonomi dan penetrasi politik. Hingga tahun 1830 masih dilakukan coba-coba eksploitasi apa yang dipandang cocok. Bahkan sempat pula menerapkan sistem sewa tanah. Namun akhirnya semuanya gagal dan tidak menuai untung, akibat berkobarnya Perang Diponegoro 1825-1830.

Kemudian tahun 1830 pemerintah Belanda mencoba politik Tanam Paksa [*Cultur Stelsel*]. Cara ini banyak mendapatkan untung tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Belanda yang tidak mempunyai kemampuan yang besar dalam bidang industri berusaha memanfaatkan daerah jajahan untuk

dieksploitasi. Pemerintah Belanda mengusahakan berbagai jenis perkebunan yang hasilnya laku di Eropa. [DR. Suhartono, 1994 : 8-9]

Pada bulan Februari 1848, Revolusi meletus di Perancis. Peristiwa tersebut pengaruhnya hingga sampai ke Nederland. Kemenangan partai liberal menyebabkan ide-ide liberalisme semakin mencuat. Adanya ajaran liberalisme yang menentang adanya campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi menyebabkan golongan ini menolak dan menuntut agar *Cultur Stelsel* dihapuskan. Diantara tokoh-tokoh liberal ini muncul F. Van de Putte, de Waal, Thorbecke, dll.

Disamping golongan liberal, golongan lain yang menentang keras adanya *Cultur Stelsel* adalah Golongan Humanis. Diantara mereka muncul tokoh-tokoh antara lain Baron van Hoevel, yang membela rakyat pribumi dengan pidato-pidatonya di depan DPR Nederland. Serta E. Douwes Dekker yang menulis suatu karangan yang berjudul *Max Havelaar* atau “*Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda*”.

Berkat perjuangan kaum liberal dan kaum humanis Belanda ini, maka sedikit demi sedikit praktek *Cultur Stelsel* dihilangkan, dan tahun 1870 sistem *Cultur Stelsel* ini sudah tidak berlaku. Sebagai perkembangannya dikeluarkan dua undang-undang yang penting yaitu undang-undang agraria yang mengatur cara kepemilikan tanah bagi pengusaha swasta, dan undang-undang gula yang mengatur pemindahan perusahaan gula ke tangan swasta. Sehingga waktu itu yang berlaku adalah politik kolonial liberal atau lebih dikenal dengan istilah *Imperialisme Modern*. [Drs. G. Moedjanto, M.A, 1992 : 19-20]

Meski *Cultur Stelsel* sebagai politik yang benar-benar memeras kekayaan rakyat telah dihapuskan dan telah dikeluarkan undang-undang yang mengatur daerah koloni seperti telah dikemukakan di atas, namun demikian nasib rakyat tetap saja tidak berubah. Kesejahteraan rakyat masih sangat jauh dari standar yang diharapkan. Oleh karena itu bukan tidak beralasan apabila banyak muncul kritik yang tertuju pada pemerintah Belanda yang waktu itu dipandang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Seorang tokoh Belanda yang bernama C. Th. Van Deventer mengajukan kritiknya dalam tulisan yang berjudul *Een*

Eereschuld [Debt of Honour atau Satau Utang Budi]. Kritik ini sempat dimuat dalam majalan De Gids yang terbit pada tahun 1899.

Dalam tulisannya tersebut dikatakan bahwa bangsa Belanda telah berhutang budi pada bangsa Indonesia yang telah bersedia menopang kegoncangan ekonomi yang ditimbulkan akibat Perang Diponegoro dan Perang Kemerdekaan Belgia. Sudah sewajarnya apabila hasil yang telah dicapai oleh kerja keras rakyat Indonesia tidak dibawa seluruhnya ke negeri Belanda, namun ada sebagian yang dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Van De Venter mengusulkan agar kebaikan hati rakyat Indonesia tersebut, dibalas dengan peningkatan kesejahteraan melalui triasnya yang terkenal yaitu “Edukasi, Irigasi, dan Emigrasi”. [DR. Suhartono, 1994 : 16]

Menanggapi hal tersebut pemerintah Belanda mengemukakan gagasan pembaharuan yang tertuang dalam pidato Ratu Wilhelmina yang berjudul *Etghische Richting [Haluan Etika]* atau *Nieuw Keurs [Haluan Baru]* yang disampaikan pada tahun 1901. Pidato tersebut pada prinsipnya akan lebih mengembangkan kesejahteraan rakyat pribumi. [Drs. G. Moedjanto, M.A, 1992 : 21]

Selintas, memang politik tersebut akan sangat menguntungkan pihak pribumi, namun pelaksanaannya sangat berat sebelah. Pengajaran yang dilaksanakan hanyalah pengajaran tingkat rendah, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan. Irigasi hanya dibangun di daerah-daerah di mana ada perkebunan yang mempunyai hak utama penggunaannya oleh pemerintah Belanda. Dan emigrasi berupa transmigrasi ke luar Jawa, khususnya ke Sumatra, dimaksudkan untuk mempermudah pengusaha-pengusaha di luar Jawa memperoleh tenaga kerja. [Drs. G. Mudjanto, M.A., 1992 : 22]

Sejalan dengan perkembangan perkebunan-perkebunan swasta, kantor-kantor pemerintah, maupun perusahaan-perusahaan swasta maka harus didukung oleh tenaga-tenaga kerja yang terdidik dalam bidangnya. Sejak itulah lulusan sekolah-sekolah sebagai dampak dari perkembangan politik etis mulai terserap untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Program Edukasi sebagai bagian dari Trias [Edukasi, Irigasi, dan Emigrasi] menyebabkan munculnya golongan elite

baru [golongan terpelajar] yang semakin lama semakin tahu akan kedudukannya yang sementara itu selalu dibeda-bedakan dalam masyarakat kolonial. Dari golongan ini pulalah muncul pembaharuan yang dalam prakteknya diwujudkan dalam bentuk organisasi pergerakan modern. [DR. Suhartono, 1994 : 16]

Memasuki abad XX bangsa Indonesia kemajuan dalam bidang pengajaran terhambat oleh masalah kekurangan dana belajar. Hal itu disebabkan karena adanya perubahan praktek-praktek eksploitasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Belanda terhadap bangsa Indonesia, yaitu kolonial tradisional, liberal, dan terakhir etis. Seorang tokoh pribumi yang mulai terbuka menyikapi keadaan tersebut adalah Dr. Wahidin Soediro Husodo. Idenya untuk menggalang dana belajar dilakukan dengan mengadakan propaganda keliling Jawa yang dilakukan sejak tahun 1906-1907. Ketika idenya mulai diperkenalkan di hadapan para siswa STOVIA [School Tot Opleiding Van Indlanche Artsen] di Jakarta, mendapat sambutan yang positif. Sebagai tindak lanjut dari tanggapan ide Dr. Wahidin tersebut maka berdirilah organisasi modern pertama yang dikenal dengan nama *Budi Utomo*. Nama tersebut merupakan usulan dari seorang siswa STOVIA yang bernama M. Soeradji, yang kemudian disepakati sebagai nama organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 tersebut. Adapun nama tersebut mengandung arti suatu pekerjaan yang mulia. [Drs. S.Z. Hadistjipto, 1996 : 43]

B. Permasalahan

Mengambil definisi mengenai museum yang praktis telah berlaku di seluruh dunia menurut ICOM [International Council Of Museums], bahwa museum adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang mengumpulkan, merawat, mengkomunikasikan dan memamerkan, untuk tujuan-tujuan pendidikan dan kesenangan, bukti-bukti material manusia dan lingkungannya. [Drs. Moh. Amir Sutaarga, 1991 : 3].

Menarik benang merah dari uraian definisi mengenai museum yang telah dipaparkan di atas akan kita temui masalah-masalah yang memerlukan

penanganan yang intensif, antara lain *melayani masyarakat dan perkembangannya*, serta *mengkomunikasikan dan memamerkan*, bukti material manusia dan lingkungannya *untuk tujuan studi, pendidikan dan kesenangan*. Dari kata-kata tersebut akan terkandung konsekuensi logis yang tidak dapat dipandang remeh. Kita ambil salah satu rangkaian kata “*melayanai masyarakat dan perkembangannya*”. Dari kata ini museum akan mempunyai kapasitas sebagai pelayan masyarakat. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsi museum, museum hendaknya harus dapat menyediakannya. Dalam hal ini jelas yaitu terkait dengan masalah studi, pendidikan, dan kesenangan. Yang lain mengenai kata “*mengkomunikasikan dan memamerkan*” yang mengandung konsekuensi bahwa museum harus mampu menjadi media *transfer of knowledge*. Tentunya dengan media material yang ada masih diperlukan kerja kerjas, sehingga material tadi dapat *telling story* [bercerita] kepada masyarakat pengunjung museum.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut, Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai salah satu museum khusus sejarah perjuangan nasional banyak menyimpan benda-benda bukti material perkembangan manusia dan lingkungannya baik realia [punya peran langsung] maupun replika [tidak punya peran langsung atau tiruan] dalam proses terjadinya peristiwa sejarah. Salah satu koleksi yang mempunyai nilai sejarah dan kejuangan adalah koleksi-koleksi yang terkait dengan Organisasi Budi Utomo. Koleksi tersebut berupa diorama adegan kongres pertama Budi Utomo yang disajikan diruang pameran tetap. Serta koleksi-koleksi pendukung lain yang terkait atau punya hubungan sejarah dengan peristiwa kongres pertama Budi Utomo tersebut.

Museum memilih cara yang paling efektif dalam menyajikan koleksinya kepada pengunjung melalui tata pameran. Demikian juga Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Koleksi-koleksi yang telah berhasil dihimpun dan dikelola sebagian besar telah disajikan dalam pameran tetap yang sampai saat ini menempati 6 ruang yaitu gedung M4, gedung diorama I, gedung diorama II, gedung diorama III, gedung diorama IV, dan ruang pameran tetap D atas. Sajian

koleksi diorama Kongres I Budi Utomo di Yogyakarta disajikan dalam ruang diorama I.

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa museum dalam perkembangannya telah berfungsi sebagai sumber informasi. Oleh karena itu keberadaan koleksi-koleksi museum yang telah disajikan dalam pameran diharapkan dapat menjadi referensi dan *science icon* [tombol pengetahuan] sehingga jika diakses akan banyak informasi yang dapat diperoleh. Sejalan dengan hal tersebut terkait dengan tema pengkajian koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta dengan judul “BUDI UTOMO : SEJARAH DAN KONGRES PERTAMA DI YOGYAKARTA 1908, SEBUAH KAJIAN KOLEKSI MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA”, terdapat beberapa masalah yang perlu diangkat, antara lain :

- a. Bagaimana kondisi sosial masyarakat Jawa pada abad XIX, ketika Budi Utomo berdiri ?
- b. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Organisasi Budi Utomo ?
- c. Apa latar belakang kongres pertama Budi Utomo, sehingga memilih tempat di Yogyakarta, dan apa hasilnya ?
- d. Bagaimana kiprah Budi Utomo selanjutnya sejalan dengan perkembangan politik yang terjadi di Indonesia memasuki abad XX ?

C. Ruang Lingkup

Salah satu upaya untuk membatasi pembahasan atau pembicaraan masalah agar tidak lepas dari konteksnya diperlukan pembatasan permasalahan atau ruang lingkup. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pengkajian koleksi ini akan kita ambil ruang lingkup pembatasan pula.

Dalam hal ini ruang lingkup pembahasan dibagi menjadi tiga yaitu ruang lingkup *material*, ruang lingkup *temporal*, dan ruang lingkup *spacial*. Ruang lingkup material, bahwa materi yang menjadi bahan kajian adalah koleksi-koleksi museum Benteng Vredeburg Yogyakarta yang terkait dengan sejarah Organisasi Budi Utomo. Diantaranya adalah diorama adegan kongres pertama Budi Utomo, foto duaja Budi Utomo, patung tokoh terkait dengan Budi Utomo

yaitu Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Dr. Sutomo, KRT. Tirta Koesoemo. Foto-Foto tokoh dan peristiwa terkait dengan Budi Utomo. Dokumen-dokumen yang terkait dengan Dr. Sutomo. Koleksi-koleksi tersebut ada yang tersaji di ruang pameran namun ada juga yang masih disimpan di ruang studi koleksi [storage].

Kemudian ruang lingkup temporal atau waktu, kami menitik beratkan pada tahun 1908 sebagai pusat kajian. Namun dalam prosesnya tidak memasang harga mati, mengingat sejarah berjalan dalam kesatuan dimensi waktu lampau, sekarang dan akan datang [*past, present, dan future*]. Sehingga akan ditemui nantinya kurun waktu sebelum 1908 sebagai gambaran prolog, dan sesudah tahun 1908 sebagai bias atau produk maupun proyeksi dari peristiwa tahun 1908.

Yang terakhir adalah ruang lingkup spacial [ruang], kami menitik beratkan koleksi-koleksi yang ada di dalam museum, namun kembali lagi pada permasalahan apabila kita mengkaji suatu moment tentunya tidak dapat mengambil secara sepenggal, artinya moment tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh moment-moment lain sebagai prolog dan epilognya. Oleh karena itu bukan suatu hal yang mustahil apabila dalam melaksanakan pengkajian ini kami bergerak ke luar lingkup museum, bahkan mungkin keluar wilayah Yogyakarta apabila memungkinkan untuk melacak data pendukung yang diperlukan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian/pengkajian koleksi museum ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. [Louis Gottschalk, 1986 : 34]

Sedangkan Nugroho Notosusanto mengemukakan bahwa metode sejarah adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintese dari pada hasil-hasilnya [biasanya dalam bentuk tertulis]. [Nugroho Notosusanto, 1978 : 10 – 11]

Proses metode sejarah terdiri dari empat tahap, yaitu *Heuristik* atau proses mencari dan menemukan sumber. Setelah ketemu maka sumber-sumber tadi dikritik [*Kritik Ekstern* dan *Kritik Intern*]. Kritik Ekstern adalah mengkritik apakah dokumen yang dicari dan ditemukan adalah yang kita kehendaki, palsu atau sejati, utuh atau sudah diubah. Sedangkan Kritik Intern adalah melakukan kritik dari dokumen yang telah dilakukan kritik ekstern tersebut. Dari kritik-kritik tersebut semua data akan berubah menjadi fakta. Dan fakta-fakta tadi harus dirangkai menjadi suatu kesatuan yang masuk akal. Hal ini dilakukan dalam tahap ketiga dalam metode sejarah yaitu *Tahap Interpretasi* [tahap penafsiran]. Setelah ditafsirkan maka barulah masuk dalam tahap *historiografi*. Yaitu penulisan sejarah. Tahap ini mempunyai tujuan merangkai fakta-fakta menjadi kisah sejarah. [Nugroho Notosusanto, 1978 : 11 – 12]

Sedangkan dalam penyampaian dalam bentuk historiografi menggunakan model deskriptif naratif, yaitu berusaha menjelaskan dalam bentuk cerita tertulis. Diharapkan dengan model ini akan lebih menarik, mudah dipahami, dan tidak menjemukan bagi pembacanya.

E. Tujuan Penelitian

Sungguh tidak bijaksana apabila sebuah tindakan dilakukan tanpa tujuan yang jelas. Demikian juga dalam kegiatan pengkajian koleksi ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum, antara lain :
 - a. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan eksistensi museum yang melayani masyarakat dan perkembangannya, khususnya Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.
 - b. Mewujudkan misi museum [Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta] sebagai sumber informasi masalah sejarah dan budaya.
 - c. Meningkatkan fungsionalisasi museum [Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta] sebagai laboratorium sejarah.

2. Tujuan Khusus, antara lain :
 - a. Memberikan sumbangan informasi tentang sejarah Budi Utomo.
 - b. Memberikan sumbangan informasi tentang eksistensi Kota Yogyakarta tempat diselenggarakannya kongres I Budi Utomo.
 - c. Memberikan tambahan pengetahuan kepada para pengunjung khususnya para pelajar mengenai Sejarah Pergerakan Nasional yang banyak diidentikkan dengan Budi Utomo.
 - d. Memupuk rasa cinta akan sejarah bangsa bagi generasi muda.

F. Kerangka Penulisan

Untuk mempermudah pemahanan dalam berfikir mengenai pengkajian koleksi museum dengan judul “BUDI UTOMO : SEJARAH DAN KONGRES PERTAMA DI YOGYAKARTA 1908, SEBUAH KAJIAN KOLEKSI MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA”, sangat perlu disusun kerangka penulisan terlebih dulu. Adapun kerangka penulisan tersebut, disusun sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang Masalah
 - B. Permasalahan
 - C. Ruang Lingkup
 - D. Metode Penelitian
 - E. Tujuan
 - F. Kerangka Penulisan
 - G. Peneliti
- Bab II. Jawa Memasuki Abad XIX
 - A. Percobaan Eksploitasi
 - B. Struktur Masyarakat Kolonial
 - C. Golongan Elite Baru (Priyayi Bangsawan dan Priyayi Profesional)
- Bab III. Bangkitnya Nasionalisme Indonesia
 - A. Nasionalisme Arti dan Perkembangannya
 - B. Lahirnya Budi Utomo

C. Pasang Surut Budi Utomo

Bab IV. Kongres Pertama Budi Utomo di Yogyakarta

A. Persiapan Kongres Pertama Budi Utomo

B. Pelaksanaan Kongres Pertama Budi Utomo

Bab V. Koleksi Museum Sebagai Referensi Sejarah

Bab VI. Penutup

G. Peneliti

Tenaga peneliti dalam kegiatan ini ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Kepala Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Nomor : 83/ST.UPT/BD/16.II/04, tanggal 16 Februari 2004. Adapun personel-personel tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Drs. Budiharja sebagai pengarah
- b. V. Agus Sulistya, S.Pd sebagai koordinator pelaksana / anggota
- c. Muri Kurniawati, S.I.P sebagai sekretaris / anggota
- d. Haris Budiharto, S.S. sebagai anggota
- e. Dra. Amin Sukrilah sebagai anggota.

BAB II

JAWA MEMASUKI ABAD XIX DAN AWAL ABAD XX

A. Percobaan Eksploitasi

Pada tahun 1861 seorang naturalis Inggris Alfred Russel Wallace mengunjungi Jawa, selama tiga setengah bulan dia menjelajahi kota-kota dan wilayah-wilayah pedalaman Jawa. Di Bogor (Buitenzorg) sebuah kota dataran tinggi yang sejuk terletak di selatan Batavia dan tempat Gubernur Jenderal, dia mengunjungi kebun raya milik Belanda yang terkenal saat itu. Kebun raya itu membuatnya kecewa, tetapi tidak demikian halnya dengan pulau Jawa itu sendiri. Ketika melangkah ke daerah-daerah pedesaan dan melihat-lihat pemandangan hutan dan gunung-gunung yang beragam dan sangat indah, dan begitu produktifnya pulau Jawa oleh tanaman-tanaman perkebunan. Dia menyebut bahwa pulau Jawa pada masa itu merupakan pulau tropis terindah di dunia [James R. Rush, 2000; 20].

Di antara pulau-pulau yang tersebar di wilayah nusantara, pulau Jawa merupakan pulau paling maju hal ini disebabkan karena kesuburan dan karena keletakannya yang strategis yang berada pada jalur perhubungan laut. Di pulau Jawa pada abad sebelumnya telah berdiri kerajaan-kerajaan dengan tingkat tertinggi perkembangan politik dan kebudayaan di nusantara. Pulau Jawa merupakan pulau terpadat penduduknya dibanding pulau-pulau yang lainnya.

Berabad-abad sebelum kedatangan bangsa barat di wilayah nusantara ini pernah berdiri kerajaan-kerajaan besar. Adapun kerajaan yang memiliki wilayah pengaruh paling luas adalah Majapahit yang merupakan kerajaan Hindu terakhir. Kedatangan para pedagang Belanda ke Hindia dengan maksud hendak menguasai perdagangan yang laku dipasaran Eropa, khususnya adalah rempah-rempah. Daya upaya untuk itu adalah didorong oleh hasrat untuk bersaing dengan Portugis di perairan timur umumnya dilakukan oleh Persekutuan Kompeni Hindia Timur (VOC) sejak didirikannya pada tahun 1602.

Pada tahun 1619 Belanda berhasil memperoleh tempat pijakannya bagi perdagangan di Jawa Barat, dan berlanjut pada tahun 1620-an dengan menyingkirkan saingan-saingannya, yaitu Portugis dan Inggris keluar dari kepulauan Maluku untuk mendapat basis kekuasaannya di kawasan ini. Pada awalnya kumpeni enggan campur tangan di dalam pertikaian di antara para raja Jawa setempat, selama keamanan tempat berpijak mereka sendiri tidak terancam. Tetapi lama-kelamaan serangkain perang suksesi pada masa keruntuhan kerajaan Mataram, yaitu selama paro pertama abad 18, telah menggugah kompeni untuk mencampuri urusan politik di Jawa, dengan melindungi salah seorang di antara penuntut atas tahta yang saling bersaing itu [Akira Nagasumi. 1989; 9]

Untuk memungkinkan pertumbuhan perdagangan Belanda lebih lanjut, kompeni (VOC) melibatkan diri dalam usaha-usaha menentramkan daerah pantai dan selanjutnya juga daerah pedalaman Jawa. Selama bertahun-tahun kompeni menjalankan pengaruh terhadap pemerintahan dan perdagangan di daerah ini. Akibatnya ketika pemerintah Belanda mengambil alih utang piutang VOC yang bangkrut pada akhir abad 18 Belanda telah menjalankan kekuasaan politik yang luas atas Jawa.

Kerajaan Mataram yang selama bertahun-tahun telah kehilangan kekuasaannya atas apapun kecuali daerah inti, oleh campur tangan Belanda tahun 1755 lalu dipecah. Sebuah kerajaan diperintah oleh susuhunan di Surakarta dan sebuah lagi oleh Sultan di Yogyakarta. Pertikaian intern yang terus berlanjut mengakibatkan terpisahnya keluarga Mangkunegara dari Surakarta pada tahun 1757, dan keluarga Paku Alam dari Yogyakarta pada tahun 1813. Daerah empat keluarga raja-raja ini oleh Belanda kemudian dikenal sebagai vorstenlanden atau daerah kekuasaan raja-raja.

Sementara secara lahiriah Belanda seolah-olah sengaja hendak menghancurkan masyarakat tradisional namun tidaklah demikian kenyataannya . Pada prakteknya campur tangan Belanda itu agak bersifat sewenang-wenang dan dilaksanakan tanpa banyak memahami kondisi setempat. Setelah Kompeni dibubarkan 1799, Belanda cenderung menyerahkan pemerintahan setempat ke tangan para bupati. Perubahan besar dalam politik Belanda atas Jawa terjadi pada

masa Perang Napoleon, dua tahun setelah kekuasaan Napoleon Bonaparte diumumkan di negeri Belanda tahun 1806, Marskhal Herman Willem Daendels dikirim ke Batavia sebagai gubernur jenderal. Selama memegang kekuasaan di Hindia gubernur Jenderal Daendels telah melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim yaitu mengurangi kekuasaan para penguasa pribumi. Dilanjutkan dengan pemerintahan Thomas Stamford Raffles kedudukan bupati terus diturunkan hak-haknya dan pengaruhnya. Dimasa pemerintahan dua tokoh itu kedudukan bupati tenggelam pada titik paling rendah.

Pemberontakan di Jawa (Diponegoro) 1825-1830 yang disebabkan oleh persoalan-persoalan sosial dan politik itu sangat menguras keuangan pemerintahan Belanda. Untuk memulihkan ekonomi Belanda yang berantakan maka Belanda mengambil kebijakan baru di Hindia dengan menjalankan *culturstelsel*, demikianlah kebijakan itu dikenal, ditujukan untuk mendapatkan keuntungan dari produksi pertanian melalui sistem penanaman dan penyeteroran wajib dengan harga yang ditetapkan yaitu untuk hasil pertanian seperti nila, gula, teh, kapas, tembakau, dan kopi di atas sekitar seperlima luas tanah tertanam di seluruh desa-desa di Jawa. Pemilihan tanamaan ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah dan petani tidak memiliki hak bersuara didalam penetapannya.

Johanes van den Bosch, yang memiliki pengalaman dari tokoh yang memperbaiki keadaan keuangan di Hindia Belanda, diangkat sebagai gubernur jenderal untuk mengawasi pelaksanaan politik baru tersebut. Salah satu perubahan terpenting dalam politik di bawah Bosch adalah pengembalian bupati dan pembesar-pembesar pribumi lainnya pada kedudukan istimewa mereka seperti semula. Pengalaman dari berlangsungnya perang Jawa memberi pelajaran kepada pemerintah bahwa pemerintah Belanda harus selalu memperlakukan bupati dan para pembesar pribumi dengan baik.

Pengawasan yang intensif, para pembesar pribumi semakin lebih merupakan pejabat-pejabat pemerintah yang makan gaji saja, mereka bukan didukung oleh penduduk pribumi tetapi dari pemerintah Hindia Belanda dengan bupati sebagai agen-agensya, kepala desa pun pada akhirnya menjadi agen pemerintah Belanda menambah jenjang baru pada kaum priyayi atau pejabat

pribumi. Sementara culturstelsel menghasilkan keuntungan yang melimpah bagi Belanda, masalah yang tidak manusiawi di dalam pelaksanaan sistem itu akhirnya memancing kritik hebat dari kalangan kaum liberal di Negeri Belanda. Akhirnya pengelolaan pertanian dan perkebuan diserahkan kepada pihak swasta namun pengawasan pemerintah atas sistem itu semakin ketat sehingga menyempurnakan transformasi kedudukan bupati, dari penguasa menjadi pejabat. Dalam periode itu gambaran teoritis pejabat-pejabat dalam pemerintahan Hindia Belanda adalah sebagai berikut:

Tata Pemerintah Eropa	Tata Pemerintahan Pribumi
Gubernur Jenderal	-
Residen	-
Assisten residen Patih Wedana	Bupati
Kontrolir	Assistan wedana Aspiran Kontrolir Manteri [Akira Nagasumi, 1989; 15]

Pada tahun 1874 sistem pemerintahan daerah di bawah Belanda sampai pada bentuknya yang terakhir: wewenang bupati dibagi-bagi menjadi jabatan patih, (pembantu bupati), wedana (pejabat distrik), asisten wedana (pejabat onderdistrik), dan manteri (sekretaris). Pada organisasi itu tata pemerintahan Eropa menambahkan jabatan-jabatan yang sejajar dengannya, yaitu asisten residen, kontrolir dan aspiran kontrolir di setiap kabupaten. Secara teoritis pejabat-pejabat ini bekerja sebagai bawahan, namun pada kenyataannya mereka merupakan pengawas terhadap pejabat-pejabat pribumi.

Asas pemerintahan sementara Inggris yang ditentukan oleh Rafles, sangat dipengaruhi oleh pengalaman Inggris di India. Pada hakekatnya Rafles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan yang dulu melekat pada sistem penyerahan paksa dan pekerjaan rodi yang dijalankan oleh kompeni Belanda (VOC) yang dibebankan kepada rakyat khususnya petani. Kepada para petani itu Rafles ingin memberikan kepastian

hukum dan kebebasan berusaha. Raffles dalam hal ini telah dipengaruhi oleh cita-cita Revolusi Perancis dengan semboyannya mengenai kebebasan, persamaan dan persaudaraan bagi setiap warga walaupun ia tentu menyadari pula konstelasi keadaan yang berlaku di Jawa tidak dapat sepenuhnya mewujudkan cita-cita tersebut. Dalam hal ini pandangan Raffles sama dengan pandangan seorang pejabat bernama Dirk van Hogendorf ini telah menarik kesimpulan dari pengamatan di Indonesia bahwa sistem feodal yang terdapat di Indonesia pada waktu itu dan yang telah berhasil dimanfaatkan oleh VOC mematikan segala daya usaha rakyat Indonesia. Oleh karena itu ia menganjurkan agar kekuasaan khususnya hak kuasa tanah para bupati atas rakyat dibatasi. Pada masa itu para raja-raja dan bupati adalah sebagai alat dalam kebijaksanaan dagangnya. Hogendorf menyarankan agar petani diberi kebebasan menentukan tanaman maupun menentukan bagaimana hasil pertanian mereka hendak dipergunakan, di bawah VOC kebebasan itu tidak ada. Beberapa asas yang dilaksanakan oleh Raffles untuk Jawa adalah; 1. Dihapuskannya bentuk penyerahan wajib/rodi, 2. Peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan, para bupati dan kepala-kepala pemerintahan lebih rendah harus memusatkan perhatian pada proyek pekerjaan umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk, 3. Pemerintah kolonial adalah pemilik tanah jadi petani dianggap sedang penyewa tanah milik pemerintah, sehingga membayar sewa (land-rent). Perubahan tersebut membawa dampak yang sangat yang sangat revolusioner bukan saja pada perekonomian semata namun merupakan perubahan sosial budaya yang menggantikan ikatan-ikatan adat tradisional dengan sistem kontrak yang belum pernah dikenal sebelumnya. Dengan demikian dasar kehidupan masyarakat Jawa yang tradisional hendak digantikan dengan dasar-dasar kehidupan masyarakat seperti yang dikenal di negara-negara Barat. Demikian pula ekonomi masyarakat Jawa yang tradisional dan feodal itu hendak digantikan dengan sistem ekonomi yang didasarkan atas lalu lintas pertukaran yang bebas. Pemikiran Raffles ini tidak berhasil dan mengalami banyak hambatan diantaranya adalah kekurangan tenaga. Pandangan dan pemikiran Raffles itu diteruskan untuk beberapa waktu oleh pejabat Belanda penggantinya seperti Jenderal Elout, Buykse dan Vander

Capellen (1816-1819), Komisaris Jenderal du Bus de Gisignis (1826-1830). Perkembangan selanjutnya sistem sewa tanah akhirnya dihapuskan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch, 1830 yang kemudian menghidupkan kembali unsur-unsur paksaan dalam penentuan tanaman-tanaman dagang dan bentuk yang lebih keras dan efisien dari pada di bawah VOC. Dengan dijalankannya *culturstelsel* maka kekuasaan penguasa-penguasa pribumi harus dikembalikan seperti semula, dengan posisinya itu dapat digunakan untuk menggerakkan rakyat, memperbesar produksi, dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diminta pemerintah. Hakekatnya *culturstelsel* adalah bahwa penduduk sebagai ganti membayar pajak tanah sekaligus harus menyediakan sejumlah hasil bumi yang nilainya sama dengan pajak tanah itu. Biasanya hasil bumi ini berupa hasil bumi untuk ekspor seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Menurut perkiraan penduduk harus menyerahkan $\frac{2}{5}$ dari hasil panen utamanya atau sebagai penggantinya $\frac{1}{5}$ dari waktu kerjanya dalam setahun. Hasil finansial dari *culturstelsel* ini bagi negeri Belanda sangat memuaskan. Sistem ini tidak hanya memberi hasil bagi pemerintah, akan tetapi juga mendorong memajukan perdagangan dan pelayaran Belanda. Negeri Belanda menjadi pusat penjualan bahan mentah dan armada dagangannya menjadi nomor tiga di seluruh dunia. Disamping itu juga menumbuhkan industri-industri, infrastruktur dan masuknya modal industri partikelir.

Reaksi terhadap sistem ini pada akhirnya banyak mendapatkan kecaman dari kelompok Liberal di Parlemen Negeri Belanda, tahun 1848. Sementara di luar parlemen terdapat sekelompok orang-orang diantaranya adalah penulis, pegawai, menteri, dan kolonialis kawakan. Berpuluh-puluh tulisan menyerang sistem tersebut. Douwes Dekker, membentangkan kekejaman-kekejaman sistem ini dalam bukunya yang terkenal, *Max Havelaar*. Seorang yang gigih melawan penyelewengan-penyelewengan pada sistem ini Van Hovell dia membela kepentingan penduduk pribumi tanpa mencela sistem eksploitasi di daerah jajahan untuk kepentingan negeri induk. Dua tokoh ini yang sangat berjasa sekali dalam menarik perhatian umum terhadap persoalan-persoalan kolonial.

Periode 1850-1870 ditandai dengan pesatnya kemajuan Eropa dan Negeri Belanda mendapat keuntungan dari perkembangan ini. Periode itu merupakan masa transisi bagi Belanda dari keadaan praindustri ke industri. Tidak diragukan lagi bahwa *culturstelseel* ikut serta membantu membangun kembali ekonomi secara besar-besaran, disamping memasukkan jutaan kekayaan ke perbendaharaan Belanda. Ekspansi perdagangan internasional Belanda terutama disebabkan oleh berkembangnya dan Bergeraknya modal. Perkembangan sektor perbankan yang cepat antara tahun 1850-1870 menunjukkan adanya konsentrasi dan sentralisasi modal. Periode tersebut industri-industri gula, timah, dan tembakau mulai berkembang dengan pesat. Dengan dihapuskannya *culturstelsel* secara berangsur-angsur, maka tanaman wajib pemerintah diganti dengan perkebunan-perkebunan yang diusahakan oleh pengusaha-pengusaha swasta [Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991; 48].

B. Struktur Masyarakat Kolonial

Terdapat hal-hal yang karakteristik yang terkandung dalam semua aspek kehidupan sosial di Jawa selama periode kolonial. Yang menarik perhatian adalah adanya jurang antara penjajah dan yang terjajah atau antara kulit putih dengan kulit coklat. Masing-masing adalah merupakan lapisan di dalam masyarakat kolonial. Diskriminasi, yaitu diskriminasi ras atau etnis merupakan ciri lain sistem kolonial. Perspektif kolonial superioritas-inferioritas mendasari prinsip diskriminasi. Sistem kolonial menghendaki diskriminasi rasial sebagai dasar pembentukan struktur dan pola hubungan sosial dalam masyarakat kolonial yang secara hirarkis menempatkan golongan bangsa yang memerintah teratas di struktur masyarakat tanah jajahan. Dalam struktur masyarakat kolonial diskriminasi mendasari sistem pergaulan dalam berbagai dimensi kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan. Diskriminasi menjadi inti hubungan sosial dan menjadi faktor penguat dalam hubungan kolonial antara golongan yang memerintah dengan yang diperintah [Sartono Kartodirdjo, 1991; 210]

Orang-orang Belanda dari segi jumlah adalah sangat kecil sekali dari 18 juta penduduk Jawa pada tahun 1870-an hanya 27.000 (0,15 persen)-nya adalah orang-orang Eropa dan kelompok ini tidak hanya meliputi orang-orang asli Belanda saja, tetapi orang-orang Barat lainnya dan banyak orang keturunan campuran Indonesia Eropa [James R. Rush, 2000; 26]. Secara sosial minoritas Eropa-Erasia yang sangat kecil ini membentuk sebuah komunitas kota kecil yang tersebar di berbagai penjuru pulau, kelompok ini merupakan elite ekonomi, ras dan politik di Jawa yang tidak tertandingi.

Kelompok kedua adalah, tujuh kali lebih besar jumlahnya dari kelompok pertama tetapi masih tetap menyumbang 1,5 persen dari total penduduk sangat penting artinya bagi pemerintah Belanda. Mereka adalah orang-orang Cina memainkan peran ekonomi yang sangat penting dalam koloni tersebut dan beberapa diantaranya adalah syahbandar-syahbandar pajak pemerintah yang kuat. Di bawah pemerintahan pejabat-pejabat yang diangkat Belanda, mereka hidup berkelompok di daerah-daerah pecinan di kota-kota pesisir dan pusat pemerintahan serta sejumlah kota-kota pedalaman di Jawa.

Penduduk pribumi Jawa yang besar jumlahnya membentuk sebuah landasan yang luas dan kaya bagi tempat kedua kelompok yang secara historis asing itu bertaut. Kelompok masyarakat ini tersusun dari beberapa kelompok etnis termasuk orang-orang Sunda dan orang-orang Banten di barat, dan sejumlah orang-orang Madura di ujung timur. Namun mayoritas terbesarnya adalah orang-orang Jawa yang menghuni tanah-tanah subur di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagian besar dari penduduk asli ini menguni ribuan desa dan hidup di bawah kebijaksanaan dan kewibawaan kepala desanya masing-masing. Kelompok ini adalah penyedia tenaga kerja dan produksi yang melandasi dibangunnya ekonomi koloni tersebut [James R. Rush, 2000; 30]

Perbedaan-perbedaan antara orang-orang Eropa, Cina, dan penduduk pribumi di Jawa bukanlah semata-mata merupakan persolaan ras, adat istiadat dan sejarah. Perbedaan itu juga ditetapkan dalam hukum kolonial. Meskipun sering terjadi keaburan keturunan dalam kehidupan nyata sehari-hari, bahasa hukum menetapkan seseorang itu Eropa, pribumi, atau Cina (orang timur asing

meliputi juga Arab dan India). Status rasial ini akan menentukan dimana seseorang tinggal, berapa besar pajak yang harus dibayar, hukum apa yang berlaku baginya jika bersalah atas suatu kejahatan, dan seberapa berat harus dihukum. Bahkan status sosial itu menentukan apa yang boleh dipakai seseorang, masa itu pemerintah kolonial pada tahun 1872 mengeluarkan peraturan dan melarang untuk tampil di muka umum dengan berpakaian yang bukan dari golongannya. Orang pribumi tidak boleh berpakaian gaya Eropa, dan orang Cina pun tidak boleh memangkas habis rambut kelabang manchunya. Hukum-hukum semacam itu yang membuat sistem kasta kolonial menjadi sangat mencolok mata. Adanya kecenderungan dari individu-individu secara alami untuk mempertunjukkan statusnya dengan pakaian berikut segala atribut perlengkapan dan perhiasan itu berpadu, menjadikan Jawa abad 19 secara visual seperti sebuah pertunjukan dramatik pangkat dan ras yang warna-warni. Menurut Sartono Kartodirdjo bahwa struktur masyarakat pada masa kolonial di Jawa, struktur itu dipandang sebagai sistem kasta di satu pihak dan sistem kelas yang terbuka di pihak lain, yaitu setelah mobilitas vertikal di dalam lingkungan kasta itu dibenarkan secara umum. Memotong batas kasta tidak mungkin, sehingga privilese-privilege politik, ekonomi dan sosial yang dinikmati golongan Eropa itu tidak dapat dinikmati golongan bumiputra. Dilihat dari segi ini, maka pendidikan modern pada masyarakat kolonial itu mendatangkan kebebasan mobilitas sosial. Mobilitas itu dibatasi dalam kerangka struktur sosial dari masyarakat kolonial yang nyata-nyata didasarkan pada diskriminasi ras.

C. Golongan Elite Baru (Priyayi Bangsawan dan Priyayi Profesional)

Penerimaan budaya Belanda oleh pembesar pribumi justru berjalan sangat cepat bahkan pada hakekatnya menyentuh setiap aspek kehidupan mereka, gaya pendidikan barat bagi pribumi (anak-anak bangsawan) pada saat itu belum ada, pendidikan formal baru ada sampai tahun 1852 pendidikan di kalangan keluarga bupati saja terpaksa harus menggantungkan diri kepada guru-guru pembimbing pribadi mereka yang kadang-kadang adalah orang sosialis Belanda yang dibuang dari negara mereka [Akira Nagasumi, 1989; 31].

Bupati yang menyewa guru Belanda ialah Pangeran Ario Tjondronegoro IV, Bupati Demak yang sering berkata kepada anak-anak laki-lakinya “tanpa pendidikan kamu bahkan akan semakin mempercepat kemerosotan anak cucu kita” , saat itu masih sedikit sekali bupati yang menyewa guru Belanda (pendidikan Barat).

Sekolah untuk anak-anak pembesar pribumi benar-benar berdiri pada tahun 1870-an, setelah dicanangkan sejak 1845 oleh Menteri Jajahan J.C. Baud, yang penting pada saat itu sebagai prioritas adalah pendidikan sebagai guru pribumi (kweekschool), dan sekolah dokter Jawa untuk mencipta mantri cacar yang didirikan di Weltevreden (Gambir, Jakarta Pusat) yang nantinya sangat penting bagi gerakan Budi Utomo. Pendidikan bagi para pribumi Jawa mulai mendapat kepastiannya. Pada tahun 1867 pemerintah Hindia Belanda membentuk Departemen Pendidikan yang berdiri sendiri dan dalam tahun 1871 pendidikan pribumi diatur dalam Maklumat kerajaan. tahun 1892 sekolah dasar pribumi yang jumlahnya terus bertambah itu dapat digolongkan dalam dua golongan; Sekolah kelas satu yang memberikan pengajaran selama lima tahun pada anak-anak pribumi, dan sekolah kelas dua dengan masa pengajaran lebih pendek yaitu tiga tahun. Jumlah murid untuk kedua golongan sekolah itu pada tahun 1899-1900 tercatat 61.742. Hoofdenscholen sekolah untuk anak laki-laki pembesar pribumi dan penduduk pribumi terpandang lainnya akhirnya dibuka tahun 1878 yang sesudah percobaan di Tondano Sulawesi Utara, ditambah tiga lagi masing-masing di Bandung, Magelang, dan Probolinggo. Bahasa Belanda tidak hanya merupakan mata pelajaran wajib merupakan mata pelajaran bahasa pengajaran kurikulum sekolah percobaan di Tondano terdiri atas geodesi, kartografi, menggambar teknik/arsitektur, pertanian, peternakan dan tata susila. tapi kurikulum di sekolah-sekolah lain yang tersebut di atas tidak diketahui. Pendidikan pemerintahan sangat berkurang di sekolah-sekolah ini. Suatu petunjuk bahwa pembesar pribumi tidak lagi diminta nasehat dalam masalah pemerintahan yang sulit. Namun dalam jangka panjang kebutuhan akan pejabat pribumi yang terpelajar dan sanggup mengabdikan pada pemerintahan kolonial, mendorong pemerintah meninjau kembali kebijaksanaannya, maka sejak tahun

1893 sekolah-sekolah itu membuka pendidikan keprofesian untuk para pejabat pemerintah pribumi. Karena itu pada pergantian abad ini (memasuki Abad 20) sekolah-sekolah yang menawarkan sesuatu yang ada di luar pendidikan dasar hanyalah kweekschool, sekolah dokter Jawa dan hoofdenshcolen. Pembaharuan dalam bidang pendidikan dalam pendidikan ini mempercepat erosi terhadap kedudukan istimewa kaum bangsawan tradisional di Yogyakarta, misalnya sebuah peraturan yang pada tahun 1890 ditetapkan oleh Sultan Hamnegku Buwono VIII menyatakan, bahwa anak laki-laki para bangsawan yang dahulu secara otomatis mengisi kedudukan sang ayah sekarang dituntut memperoleh ijazah pendidikan sebelum diizinkan mengambil alih jabatan ayahnya itu. Pada akhir abad ke-19 hirarki tradisional di dalam masyarakat Jawa menuju kehancurannya. Pendidikan formal menurut pola barat telah menjadi keharusan bagi orang-orang Jawa yang menginginkan perbaikan kedudukannya di dalam masyarakat kolonial.

Persaingan pada kedua abad 19 antara kekuatan dunia (penjajah) menghebat di Asia Tenggara, sebuah karangan ditulis tahun 1899 oleh C.Th. Vandeventer pengacara, dan bekas pejabat peradilan kolonial, kemudian anggota parlemen negeri Belanda membawa pengaruh menentukan bagi perubahan politik kolonial. karangan yang berjudul "Utang Budi" itu mengemukakan bahwa bangsa Belanda berutang kepada Hindia Belanda oleh keuntungan yang diperolehnya selama-dasawarsa-dasawarsa yang lalu. Pidato Ratu Wilhelmina pada tahun 1901 mengumandangkan berlangsungnya zaman baru dalam politik kolonial yang lazim disebut "Politik Etis". Pidato Wilhelmina itu didasari oleh suatu keyakinan mendalam tentang keunggulan budaya barat. Dengan perkataan lain pembaharuan harus dilaksanakan dari dasar, modernisasi dipersamakan dengan pem-barat-an atau lebih tegas lagi pem-belanda-an. Tujuan politik etis secara teori bersifat rangkap yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi, dan berangsur-angsur menumbuhkan otonomi dan sentralisasi politik di Hindia Timur atau lebih terkenal dengan tiga sila yaitu: irigasi, edukasi, dan emigrasi.

Sebagai dampak perubahan sosial, ekonomi dan politik yang menyertai penetrasi kolonial beserta modernisasi timbulah dinamika internal dalam masyarakat Indonesia sebagai akibat dari reaksi pelbagai unsurnya serta interaksi diantaranya. [Akira Nagazumi,1989; : 86]. Perkembangan masyarakat kolonial pada awal abad ke 20 telah ditandai dengan dampak mobilitas kaum pribumi yang digerakan oleh perluasan pengajaran, meskipun masih ada pembatasan-pembatasannya, hal itu bukan lagi menjadi hak istimewa dari aristokrasi lama (bangsawan). Terdapat garis pemisah antara priyayi birokrasi dengan priyayi profesional, golongan yang disebut kedua itu mencakup unsur-unsur baru yang melewati jenjang pendidikan dapat menduduki tingkat sosial lebih tinggi dari tingkat asalnya. sedangkan golongan priyayi birokrasi terbatas. Di kota kecil interaksi antara golongan priyayi profesional lebih intensif serta melampaui batas-batas profesi. Sehingga timbullah tempat-tempat berkumpul atau lebih dikenal dengan nama soos (singkatan dari soosocietet) sebagai tempat berekreasi atau berapat.

Ada beragam gaya hidup serta sikap dari golongan priyayi, priyayi ningrat menunjukkan martabatnya serta kewibawaannya dengan pelbagai tanda kebesaran, kesemuanya penuh perlambang statusnya, sedangkan priyayi profesional yang ada diluar hirarki dapat memakai gaya gaya hidup lebih bebas dan sering banyak menyerap unsur-unsur modern, baik yang bercorak Barat maupun yang telah disesuaikan dengan lingkungan Indonesia. Terbukalah berbagai alternatif dalam proses adaptasi itu, umpamanya gaya arsitektur rumah yang lazim disebut loji yang telah memakai tata ruang berdasarkan akan kebutuhan priyayi, perkakas yang bertalian dengan kebudayaan duduk di kursi, pakaian modern, susunan keluarga yang lebih mengarah pada keluarga inti, bahasa sehari-hari yang telah banyak dipengaruhi oleh pendidikan barat dan seterusnya.

Lapisan golongan masyarakat yang menonjol karena muncul dari adanya perubahan-perubahan dalam pemerintahan kolonial adalah golongan priyayi. Kata priyayi berasal dari kata para yayi, atau “para saudara raja” walaupun penggunaan kata saudara semula barangkali hanya ditujukan sebagai pertalian

darah dengan raja tau bupati, setelah bertahun-tahun istilah ini kehilangan konotasinya, dengan nuansa yang sedikit berbeda-beda menurut daerah masing-masing, istilah ini pada umumnya diartikan untuk menyebut para pejabat pemerintahan pribumi yang berkedudukan rendah atau berumur lebih muda dari pada raja atau bupati.

Pada sekitar pertengahan abad 20 priyayi telah berkembang dari kedudukan sebagai hamba pembesar pribumi menjadi pangkat sebagai pejabat pribumi untuk pemerintahan kolonial. masa penghambaan dengan cepat digantikan dengan pendidikan formal atau semacamnya. Masa pemagangan masih tetap namun telah berubah menjadi masa menunggu untuk pengangkatan formal oleh pemerintah dan sudah tidak lagi tergantung kepada pembesar/bangsawan. Sementara itu seiring dengan perkembangan pengabdian priyayipun diperluas untuk mengisi jabatan-jabatan baru di luar batas-batas birokrasi tradisional [Sartono Kartodirdjo, 1991; 89].

BAB III

BANGKITNYA NASIONALISME INDONESIA

Dilihat dari pengalaman sejarah, abad XX merupakan abad nasionalisme. Artinya dari permulaan hingga akhir kurun waktu abad ini, muncul kesadaran berbangsa di berbagai negara. Berkaitan dengan hal ini, Dr. Suhartono menyatakan bahwa Indonesia telah mengawali abad ini dengan kesadaran berbangsanya, yang kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa di Semenanjung Balkan yang menginginkan negara (nation) yang mandiri dan merdeka. (Dr. Suhartono, 1994 : V)

Perlu dikemukakan di sini bahwa nasionalisme di Indonesia sungguh berbeda dengan nasionalisme yang berkembang di negara-negara lain di dunia. Nasionalisme Indonesia adalah murni dari dampak yang ditimbulkan oleh adanya praktek kolonialisme (Belanda) di wilayah tersebut. Nasionalisme di Indonesia adalah bentuk perlawanan (antithesis) dari sosio – politik kolonialisme yang dipraktekkan oleh Belanda. Sehingga bukan tidak beralasan apabila organisasi modern bangkit dan mengadakan perlawanan, meskipun jika disadari bahwa munculnya organisasi modern tersebut merupakan dampak modernisasi sebagai hasil dari kebijakan kolonial sendiri. Kondisi yang ada memacu munculnya lembaga-lembaga yang berpotensi sebagai wadah aspirasi berbagai etnik yang mengalami penderitaan sosial yang tak kunjung padam. Celah pembatas antara yang terjajah dan yang menjajah semakin jelas nyata dan tak mungkin terjembatani. Oleh karena itulah akhirnya proses mengarah pada pembentukan kekuatan bersama untuk mewujudkan identifikasi. Dari sinilah proses identifikasi tersebut membawa bangsa Indonesia menemukan identitasnya yang kemudian lazim disebut sebagai nasionalisme Indonesia meski masih dalam taraf awal.

A. Nasionalisme Arti dan Perkembangannya

Menurut Ensiklopedi Indonesia jilid 4, bahwa yang dimaksud dengan nasionalisme adalah sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa, dan wilayah, serta

kesamaan cita-cita dan tujuan, dengan demikian merasakan adanya kesetiaan mendalam terhadap kelompok bangsa itu. Dalam pengertian modern, nasionalisme berasal dari Revolusi Perancis, tetapi akar-akarnya telah tumbuh dengan kelahiran kerajaan-kerajaan yang sangat memusat, dengan doktrin ekonomi merkantilisme, dan dengan timbulnya golongan tengah yang kuat. Dewasa ini nasionalisme juga dihubungkan dengan setiap hasrat untuk persatuan atau kemerdekaan nasional, tetapi juga dapat merupakan daya perusak dalam negara-negara dengan banyak bangsa atau suku bangsa. (Hassan Shadily, TT : 2338)

Sedangkan AG. Pringgodigdo memberikan batasan bahwa yang dikenal dengan nasionalisme adalah filsafat politik dan sosial yang menganggap kebaikan bangsa paling utama. Nasionalisme ditandai oleh patriotisme dan oleh keyakinan nilai-nilai politik dan kulturil suatu bangsa dalam nasib yang akan dicapainya. Nasionalisme ekstrim bangkit dalam abad XIX dan telah menyebabkan pertentangan-pertentangan dalam dan di antara negara-negara. Banyak orang melihat nasionalisme sebagai kekuatan pemecah dunia, setengah orang menganggapnya sebagai perangsang bangsa-bangsa. (AG. Pringgodigdo, 1991 : 732)

Mengenai rumusan apa yang dimaksud dengan nasionalisme, kiranya definisi secara tepat tidak dapat disusun. Namun yang jelas bahwa proses lahirnya nasionalisme itu sendiri memakan waktu yang relatif lama. Menurut Dr. Suhartono, nasionalisme sendiri mengacu pada faham yang mementingkan perbaikan dan kesejahteraan nasio atau bangsanya. (Dr. Suhartono, 1994 : 4)

Indonesia dan negara-negara lain di Asia yang mengalami rasa yang sama yaitu menjadi negara terjajah, secara serempak membangkitkan rasa nasionalismenya sendiri-sendiri dan mencapai apa yang dinamakan kemerdekaan. Aksi-aksi protes yang berupa gerakan-gerakan menentang kolonialisme membawa mereka kepada suatu kurun waktu dimana menjadi negara yang bebas merdeka setelah Perang Dunia II.

Munculnya nasionalisme di Indonesia pada khususnya dan negara-negara di Asia pada umumnya sungguh berbeda dengan munculnya nasionalisme di

Daratan Eropa. Munculnya nasionalisme Indonesia sangat erat hubungannya dengan adanya praktek kolonialisme Belanda di Indonesia waktu itu. Gerakan-gerakan protes menentang kolonialisme sebagai manifestasi dari adanya tekanan-tekanan dan penderitaan oleh kolonialisme itulah yang disebut sebagai nasionalisme. Adanya keinginan bersama yang didasari oleh adanya kepentingan bersama inilah yang kemudian memunculkan adanya bangsa Indonesia. (Dr. Suhartono, 1994 : 4)

Terkait dengan masalah ini Prof. Dr. Sartono Kartodirjo menekankan bahwa tidak dapat disangkal lagi bahwa nasionalisme merupakan hasil terpenting dari adanya pengaruh pengaruh kekuasaan barat di negeri Asia di jaman modern. Nasionalisme telah berkembang sebagai suatu jawaban terhadap kondisi politis, ekonomi, dan sosial khususnya, atas situasi kolonial. Nasionalisme dan kolonialisme tidak terlepas satu sama lain, tetapi bahkan keduanya terdapat hubungan timbal balik antara nasionalisme yang sedang berkembang dengan politik kolonial dengan ideologinya. (Sartono Kartodirjo, 1993 : 58)

Sedangkan di Eropa proses munculnya nasionalisme terjadi pada masa transisi dari masyarakat feodal ke masyarakat industri yang terjadi pada abad XVII. Kekuasaan feodal (raja, bangsawan, gereja) perlahan-lahan tidak mampu menandingi desakan golongan baru di kota-kota yang menguasai perdagangan dan industri. Perpaduan keduanya melahirkan apa yang dikenal dengan "*Revolusi Industri*". Kaum feodal mulai digantikan oleh kaum borjuis kota yang tidak mau terikat dengan ketentuan dan aturan dalam masyarakat agraris. Mereka ingin bebas melakukan usaha, bersaing, dan mencari keuntungan sebanyak mungkin. Inilah yang kemudian dikenal dengan *Liberalisme*. Kaum borjuis dengan revolusi industrinya ini kemudian berkembang di Eropa Barat.

Dalam suasana itulah maka nasionalisme di Eropa Barat berkembang. Keadaan ini membangun keharusan adanya perbedaan dan pembatasan yang tajam diantara mereka. Nasionalisme Eropa Barat berkembang dengan hebat hingga membentuk suatu karakter yang mengedepankan emosi, sentimen, kecongkaan, chauvinisme yang lama kelamaan melahirkan apa yang dikenal dengan *Kolonialisme* yaitu nafsu untuk mencari jajahan di luar benuanya sendiri.

Ketika kapitalisme mencapai puncak kejayaannya, industri-industri bertambah maju maka jumlah kelompok proletar semakin banyak. Kondisi ekonomi yang terjadi menyebabkan munculnya reaksi yang menentang kenyataan penghisapan oleh manusia atas manusia (*exploitation de l'homme par l'homme*) dan muncullah **Komunisme**. Komunisme menentang liberlisme dan kapitalisme. (Kolektif komunisme menentang individualitas kapitalisme dan liberalisme).

Kolonialisme pada dasarnya adalah memanfaatkan penguasa pribumi untuk menekan rakyatnya. Masyarakat dikuras bahan dasarnya dan sekaligus menjadi pasar dari barang-barang yang telah dihasilkannya. Masyarakat merasa kebebasannya ditekan dan mengalami penderitaan. Selanjutnya masa inilah yang dijadikan kekuatan nasionalisme. Nasionalisme berusaha mengembalikan hargadiri yang telah tercampak akibat adanya kolonialisme dan imperialisme. (Dr. Suhartono, 1994 : 5-7)

Dalam pembentukan nation, terdapat tiga teori. *Pertama*, adalah teori kebudayaan yang menyebut suatu bangsa adalah sekelompok manusia yang berkebudayaan sama. *Kedua*, adalah teori negara (*staat*) yang menentukan terbentuknya suatu negara lebih dulu adalah penduduk yang ada di dalamnya yang disebut bangsa. *Ketiga*, adalah teori kemauan (*will*), yang mengatakan bahwa syarat mutlak yaitu adanya kemauan bersama dari sekelompok manusia untuk hidup bersama dalam ikatan suatu bangsa, tanpa memandang perbedaan kebudayaan, suku, dan agama. Menurut Dr. Suhartono, bahwa dari ketiga teori di atas yang paling cocok dengan keadaan bangsa Indonesia adalah teori yang berdasarkan keinginan (*will*). (Dr. Suhartono, 1994 : 8)

B. Lahirnya Budi Utomo

Sementara itu di Hindia Belanda (baca Indonesia) pada abad XIX situasi sosial ekonomi mengalami masa yang sangat memprihatinkan akibat adanya ujicoba eksploitasi rakyat bumiputera yang dijalankan oleh pemerintah kolonial dari sistem eksploitasi kolonial tradisional, liberal dan etis. Westernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial menyebabkan terjadi perubahan sosial masyarakat bumiputera secara drastis. Pada satu pihak keuntungan *batig slot* terus

dialirkan ke negeri Belanda, sedangkan disatu pihak masyarakat bumi putera tetap dibiarkan akrab dengan kemelaratan dan kesengsaraannya. (Dr. Suhartono, 1994 : 29-30)

Dengan telah dicanangkannya Politik Etis oleh Direktur Pendidikan, Agama, dan Industri (Abendanon) kurang lebih tahun 1900-1905, maka sekolah untuk anak-anak Eropa mulai terbuka bagi anak-anak bumiputera. Tahun 1902 Sekolah Juru Kesehatan Bumiputera atau Sekolah Dokter Jawa (*School voor Inlandsche geneeskundigen*) ditingkatkan menjadi Sekolah Dokter Bumiputera (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* atau *STOVIA*). Juga masih dalam tahun yang sama (1902) program transmigrasi (*emigratie*) mulai dijalankan, dengan terbentuknya tim peneliti lahan di sumatra Selatan dibawah pimpinan H.G. Heyting. Kemudian sebagai tindak lanjut dari program irigasi, maka pada tahun 1904 dibentuk departemen baru, Departemen Pertanian (*Departement van Landbouw*).

Dari permukaan memang terlihat Politik Etis merupakan sebuah usaha balas budi yang akan berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi, namun pada kenyataannya tidak seperti yang nampak di permukaan. Rakyat bumiputera tidak dibimbing untuk mengetahui keadaan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Rakyat bumi putera tidak lebih hanya sebagai sasaran obyek dari proyek-proyek yang dikembangkan oleh sistem kolonial. Program Desentralisasi yang dilaksanakan, menyebabkan birokrasi berpola Eropa makin masuk ke pola pikir masyarakat bumiputera. Kewibawaan dan kemuliaan pejabat-pejabat bumiputera semakin berkurang. Sehingga hal ini menjadikan anak-anak Bumiputera lapisan atas semakin tidak tertarik pada jabatan bumiputera. Hal ini sangat memberi peluang pada anak-anak bumiputera priyayi kecil dan rakyat biasa untuk menduduki jabatan di kalangan bumiputera. Oleh karena itu, keadaan ini merangsang anak-anak bumiputera dari golongan priyayi kecil untuk menempuh pendidikan Eropa, sehingga tidak mengherankan jika mereka berbondong-bondong masuk Sekolah Dokter Bumiputera (STOVIA), sekolah pertanian, OSVIA, dan Sekolah Guru. (Parakirti T. Simbolon, 1995 : 225-227) Dari pengembangan pendidikan itulah akhirnya justru menjadi bumerang bagi

pemerintah kolonial. Rakyat bumiputer menjadi semakin tahu pososinya dan semakin tahu bahwa sebenarnya posisi mereka telah dibeda-bedakan.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa memasuki abad XIX keadaan ekonomi di Hindia Belanda memasuki masa memprihatinkan. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dunia pendidikan rakyat bumi putera waktu itu. Oleh karenanya masalah biaya pendidikan menjadi masalah yang harus dipecahkan agar proses memajukan pendidikan bagi kaum bumi putera yang kebanyakan dari kalangan priyayi (priyayi rendahan) berjalan dengan lancar. Banyak diantara mereka yang berotak brilian namun karena terganjal masalah biaya, akhirnya usaha untuk memperoleh pendidikan mengalami kegagalan.

Menghadapi keadaan yang demikian kita tidak dapat mengesampingkan peranan seorang tokoh yang peduli akan majunya pendidikan kaum bumiputera. Beliau adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang lahir di desa Mlati, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 1852. Pada umur 15 tahun beliau sudah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dokter Jawa di Weltevreden, dan tahun 1872 langsung diangkat menjadi asisten dosen di Sekolah Dokter Jawa tersebut. Setelah beberapa tahun menduduki jabatannya, pada tahun 1895 Dr. Wahidin Sudirohusodo meninggalkan tugasnya dan kembali ke Yogyakarta dan mendirikan surat kabar berkala bernama "*Retnodhoemilah*" yang terbit setiap hari Selasa dan Jum'at. Selama kurang lebih 10 tahun Dr. Wahidin Sudirohusodo menggeluti bidang persurat kabaran di Retno Dumillah. Pada tahun 1901 – 1906 beliau memegang sendiri pimpinan redaksinya. Selanjutnya pada bulan Nopember 1906 beliau mengundurkan diri dengan alasan sakit, dan sebagai penggantinya adalah Mas Wignjohardjo. (Drs. S.Z. Hadisutjipto, 1996/1997 : 26-27)

Pada hari-hari pertama setelah berdirinya, pemimpin redaksi majalah Retnodhoemilah adalah F.L. Winter yang jelas bukan orang Jawa. Ia banyak menulis buku tentang karya sastra Jawa. Pada tahun-tahun pertama awal penerbitannya, isi karangan antara lain mengenai berita dari Surakarta, Yogyakarta, Malang, Rembang, Cirebon, dan kota-kota lain di Jawa. Peristiwa-peristiwa sekitar raja-raja dan para bupati diikuti dengan sangat cermat. Disamping itu juga meliput secara instensif mengenai kejadian-kejadian politik di luar negeri.

Hal inilah yang menjadikan Retnodhoemilah berbeda dengan surat kabar lain yang sejaman seperti *Pewartu Prijaji*. Perubahan yang lebih menyolok tentang muatan berita, terjadi sejak tahun 1901 ketika pimpinan redaksi diserahkan kepada Dr. Wahidin Sudirohusodo. Baik dalam eksistensinya sebagai redaktur maupun atas nama pribadi Dr. Wahidin Sudirohusodo memainkan peranan penting dalam menggalakkan pendidikan dan penyadaran terhadap orang Jawa. Sebagai redaktur Dr. Wahidin Sudirohusodo berusaha berkomunikasi dengan kalangan luas penduduk pribumi. Maka dalam edisi pengangkatannya dia mengumumkan, bahwa selanjutnya Retnodhoemilah tidak hanya diterbitkan dalam bahasa Jawa, tetapi juga dalam bahasa *Melayu sedang* bukan hanya *Melayu tinggi*, sehingga pembaca Jawa rata-rata akan bisa menangkap isinya dengan mudah. (Akira Nagazumi, 1989 : 41-42, 45)

Ketika Dr. Wahidin Sudirohusodo sedang giat melontarkan buah pikirannya tentang masalah pendidikan, Mr. J.H. Abendanon sebagai Direktur Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan mewakili pihak kolonial juga sedang bersemangat melaksanakan rencana memajukan pendidikan rakyat bumiputera yang telah berjalan sejak 1900. Namun hal itu justru menjadikan kurang adanya tanggapan bagi masyarakat Jawa. Oleh karena itu Dr. Wahidin Sudirohusodo kemudian memilih jalur langsung menemui para pemuka masyarakat Jawa dan memohon agar mereka mau terlibat menyumbangkan dana beasiswa. Untuk ini maka Dr. Wahidin Sudirohusodo melepaskan pekerjaan sebagai direktur majalah Retnodhoemilah. (Parakirti T. Simbolon, 1991 : 231-232)

Dasar pemikiran Dr. Wahidin Sudirohusodo sehingga ia berani mengambil resiko dengan menetapkan keputusannya adalah : bahwa sebagian besar rakyat Hindia Belanda (Indonesia) baik dalam bidang spiritual, maupun dalam segi material masih sangat buruk dan terlantar. Martabat rakyat harus diangkat ke taraf yang lebih tinggi, dengan jalan memberikan bantuan kepada mereka yang tidak mampu membiayai sekolah di perguruan tinggi. Oleh karena itu perlu segera didirikan suatu badan yang menyelenggarakan *Studiefonds* (Dana Pendidikan), untuk menolong para pemuda Indonesia agar mereka dapat menuntut pelajaran di

Perguruan Tinggi. Oleh karena itu dalam usahanya mewujudkan cita-citanya tersebut maka pada tahun 1906 – 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo mengadakan perjalanan keliling Jawa mempropagandakan pembentukan Studiefonds. Para bangsawan dan priyayi menjadi sasaran propaganda Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk ikut aktif memikirkan pendidikan. Di kota-kota yang dikunjunginya beliau giat menyampaikan pidatonya dalam rapat-rapat maupun pertemuan-pertemuan. Materi yang disampaikan berkisar masalah perluasan pengajaran bagi rakyat bumi putera.

Semangat Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai jiwa pejuang sungguh luar biasa. Meski harus mengeluarkan biaya dari kantongnya sendiri untuk melakukan perjalanan keliling Jawa, beliau juga menghadapi resiko akan kesehatannya. Di muka telah disebutkan bahwa Dr. Wahidin Sudirohusodo menyatakan berhenti dari tugasnya di majalah *Retnodhoemilah* pada bulan November 1906 dengan alasan sakit keras. Namun dalam majalah *Retnodhoemilah* yang terbit tanggal 8 Desember dan 9 Maret 1907 termuat berita-berita tentang perjalanannya. Hal ini sungguh luar biasa. (Drs. S.Z. Hadisutjipto, 1996/1997 : 26-27)

Tidak selalu semua usaha mulia mendapat tanggapan yang menyenangkan. Demikian pula usaha yang dilakukan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dalam perjalanan keliling Jawa untuk mempropagandakan Studiefonds, Dr. Wahidin Sudirohusodo banyak mengalami hambatan. Tidak sedikit golongan bangsawan yang didatanginya hanya memberikan tanggapan dingin. Hal ini dipandang sebagai rasa kekhawatiran akan kehilangan kedudukannya di dalam masyarakat apabila rakyat telah memperoleh kecerdasannya di negeri jajahan. Itulah sebabnya, sebagian dari golongan bangsawan tidak tertarik akan propaganda Dr. Wahidin Sudirohusodo. Oleh karena itu ia mencoba melirik kaum muda untuk diajak membahas buah pikirannya. Karena menurutnya para pemuda (pelajar) dinilai mudah menangkap maksud dan tujuan dari adanya studiefonds tersebut. Para pemuda yang telah mendapat imbas dari pendidikan modern pandangannya akan terlontar jauh ke depan. (Drs. Sudiyo, 1989 : 14)

Dalam perjalanannya ke Banten untuk mempropagandakan Studiefonds, Dr. Wahidin Sudirohusodo pada akhir tahun 1907 memerlukan singgah ke STOVIA di Weltevreden (Jakarta sekarang). Ketika itu Soetomo dan Soeradji seorang pelajar STOVIA dengan tiba-tiba mengundang Dr. Wahidin Sudirohusodo dan ingin sekali mendengarkan gagasan-gagasannya. Setelah mendengarkan gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, Soetomo segera larut dalam kegiatan mendirikan suatu perkumpulan di STOVIA. Oleh karena mereka tinggal bersama dalam asrama maka salah satu keuntungan yang didapat adalah begitu mudahnya hubungan satu sama lain dijalin. Minat terbesar untuk membentuk satu perkumpulan di STOVIA muncul dari siswa-siswa yang berasal dari Jawa, yang merupakan mayoritas, dan oleh teman-teman sekelas Soetomo dan Soeradji. Mereka berdua (Soetomo dan Soeradji) kemudian berkeliling dari kelas ke kelas mencari dukungan. (Akira Nagazumi, 1989 : 57)

Sedangkan untuk daerah-daerah yang berada di luar Batavia, Soetomo dengan beberapa orang temannya mencari dukungan melalui media surat yang dikirim antara lain ke Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Magelang. Sungguh diluar dugaan, ternyata dukungan, dorongan dan persetujuan datang mengalir dari berbagai tempat, sehingga angan-angan yang dulu masih ragu kini semakin mantap. Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1908, kurang lebih pukul 9 pagi, Soetomo dan kawan-kawannya antara lain M. Soeradji, M. Muhammad Saleh, M. Soewarno, M. Goenawan, Soewarno, R.M. Goembrek, R. Angka, dan M. Soelaiman, berkumpul dalam ruang kuliah anatomi. Setelah segala sesuatunya dianggap telah masak maka mereka sepakat memilih **BOEDI OETOMO** (Budi Utomo) menjadi nama perkumpulan yang baru saja mereka resmikan berdirinya. Tepuk tangan bergemuruh menandai kelahiran organisasi tersebut. Hadirin yang berkumpul di aula STOVIA tersebut tidak hanya para siswa di sekolah tersebut, melainkan juga siswa-siswa dari Sekolah Pertanian dan Kehewanan di Bogor, Sekolah Pamong Praja Pribumi di Magelang dan Probolinggo, Siswa-siswa Sekolah Menengah Petang di Surabaya, dan sekoah-sekolah pendidikan guru pribumi di Bandung, Yogyakarta, dan Probolinggo. (Akira Nagazumi, 1989 : 62)

Mengenai siapa yang hadir dalam rapat pembentukan Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908, Parakirti T. Simbolon menyebutkan bahwa mereka adalah siswa-siswa yang berusia antara 19 – 22 tahun dan berasal dari tujuh sekolah menengah di Jawa antara lain : *Cultuurschool* (Bogor), *OSVIA* (Magelang, Probolinggo), *Normaalschool* (Yogyakarta, Bandung, Probolinggo), dan *HBS* (Surabaya). (Parakirti. T. Simbolon, 1991 : 232) Seruan para pelajar STOVIA ini dengan cepat segera tersebar ke seluruh Jawa.

Adapun susunan kepengurusan adalah sebagai berikut :

Ketua : R. Soetomo
Wakil Ketua : M. Soelaiman
Sekretaris I : Soewarno
Sekretaris II : M. Goenawan
Bendahara : R. Angka
Komisaris : M. Soewarno, M. Muhammad Saleh, M. Soeradji, M. Goembrek.

Nama organisasi Budi Utomo adalah atas usul M. Soeradji yang kemudian diterima dengan baik oleh kawan-kawannya. Pengajuan nama tersebut karena dilatarbelakangi dengan peristiwa ketika Dr. Wahidin Sudirohusodo hendak ke Banten dan singgah di STOVIA, Soetomo memberikan komentar terhadap usaha Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk mempropagandakan adanya studiefonds, antarlain demikian : “*Menika satunggaling padamelan sae sarta nelakaken budi utami*”. (Itu suatu pekerjaan baik dan menunjukkan budi yang utama). Kata “budi utami” adalah bentuk kromo dari pada “budi utomo”. Sebetulnya ada dua nama yang oleh M. Soeradji diusulkan untuk nama organisasi tersebut yaitu “Eko Proyo”, dan “Budi Utomo”. Namun yang dipakai adalah yang terakhir, hal ini juga dikaitkan dengan sebuah penghormatan terhadap tokoh yang mempunyai gagasan dan mencetuskan adanya ide pembentukan organisasi di STOVIA, yaitu Soetomo. (Drs. S.Z. Hadisutjipto, 1996/1997 : 42-43)

Sungguh luar biasa, bahwa Budi Utomo yang lahir karena bertemunya gagasan Soetomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang dipadukan mempunyai pandangan ke depan yang begitu luas. Bahkan studie fonds yang menjadi tujuan

pokok Dr. Wahidin Sudirohusodo, dalam Budi Utomo hanya menjadi salah satu bagian saja. Budi Utomo didirikan atas dasar kebudayaan yang luas. (L.M. Sitorus, 1988 : 7)

Langkah pertama yang dilaksanakan setelah organisasi Budi Utomo berhasil didirikan antara lain mengadakan hubungan dengan pelajar-pelajar di kota-kota lain seperti di Sekolah Pertanian Bogor, Kweekshool Bandung, Kweekschool Yogyakarta, OSVIA (Opleiding Shool voo Inlandsche Ambtenaren) Magelang, sehingga cabang-cangan Budi Utomo segera berdiri di kota-kota tersebut. Pembentukan cabang Budi Utomo di Magelang langsung ditangani oleh Soetomo dan beberapa orang pengurus. Dari Magelang Soetomo terus ke Temanggung menemui Bupati Tjokro Adi Koesoemo. Sedangkan dengan R.M.A.A. Koesoemo Oetojo (Bupati Jepara) dan Pangeran Achmad Djajadiningrat (Bupati Serang) dicapai malalui surat. Serta pertemuan dengan P.A.A Koesoemo Joedo dilangsungkan oleh Soetomo di rumahnya di Weltevreden sebelum Soetomo berangkat ke Magelang. M. Muhammad Saleh mendapat tugas ke Jepara menemui para putri adik R.A. Kartini. M. Goenawan ke Karang Anyar menemui Bupati R.A. Tirto Koesoemo. (Drs. S.Z. Hadisutjipto, 1996/1997 : 50) Begitu pesat dan suksesnya sosialisasi yang dilakukan oleh Soetomo dan kawan-kawan untuk mendukung Budi Utomo, maka sampai dengan bulan Juli 1908 jumlah anggota Budi Utomo telah mencapai 650 orang. (Akira Nagazumi, 1989 : 65).

Didalam menyusun organisasi Budi Utomo, Soetomo dibantu oleh rekan-rekannya yang cakap. M. Soeradji dengan kepandaiannya mengolah kata-kata halus dan *kromo inggil* nya yang *temata* (tersusun rapi dan benar) ditugasi untuk memberikan pengertian kepada tokoh-tokoh tua di Jawa tengah. M. Mohammad Saleh bertugas menangani administrasi (mengatur rapat dan rumah tangga). Soewarno dengan kemahirannya berbahasa Belanda dalam menulis terutama bidang kesenian bertugas menyelenggarakan perhubungan dengan Belanda. Sedangkan M. Goenawan Mangoenkoesoemo bertugas memberikan keterangan kepada pers. (Akira Nagazumi, 1989 : 64, lihat juga Drs. S.Z. Hadisutjipto, 1996/1997 : 49)

Tugas yang diemban oleh Soetomo dan teman-teman setelah berdirinya Budi Utomo sangatlah berat. Konsekuensi sebagai pengurus organisasi tersebut diperlukan pengorbanan yang tidak ringan. Hal ini dilatarbelakangi bahwa mereka masih berstatus sebagai pelajar yang harus memikirkan tugas belajarnya disamping harus memperjuangkan kehidupan organisasi yang didirikannya. Oleh karena itu Soetomo berpendapat bahwa Budi Utomo akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan apabila dipimpin oleh orang yang sudah berpengalaman dan berprestasi. Oleh karena itu Soetomo dan teman-temannya berkeinginan agar organisasi bentukannya itu segera mengadakan kongres untuk secara resmi menjadikan organisasi Budi Utomo sebagai organisasi bagi seluruh masyarakat Jawa (*Algemene Javaansche Bond*). Disamping itu usaha menarik anggota sebanyak mungkin juga dilakukan. Dengan semboyan *Java Vouruit* (Jawa Maju) dan *Santosa Waspada Anggajoech Oetomo* (upaya mencapai kesempurnaan dengan teguh dan waspada), Budi Utomo berhasil mengajak hampir seluruh siswa sekolah menengah di Jawa. Bahkan secara khusus Soewarno sebagai sekretaris menyiarkan cita-cita dan program Budi Utomo melalui *Bataviaasch Nieuwsblad* (17 Juli 1908) dan *De Locomotief* (24 Juli 1908). Dalam siaran ini disebutkan secara eksplisit bahwa tujuan umum Budi Utomo adalah **“Kemajuan Bagi Hindia”**, jadi bukan hanya Jawa saja. Diakui memang untuk itu sangat sulit, karena adanya sikap masa bodoh sesama bangsa sendiri. Sikap ini berakar pada masyarakat bumiputera dimana priyayi kecil takut terhadap atasannya yaitu priyayi besar, sementara priyayi besar acuh tak acuh terhadap cita-cita kemajuan. Karena itu mereka menggalang persatuan pemuda, dan selanjutnya organisasi akan diserahkan kepada orang tua untuk memimpinya. Hasilnya adalah pembentukan Budi Utomo, yang bertujuan meringankan beban perjuangan hidup bangsa Jawa melalui perkembangan yang harmonis dan bersifat kerohanian. (Parakirti T. Simbolon, 1991, 233)

Terjadinya perubahan dalam sebuah masyarakat pasti akan menimbulkan dampak (*effect*). Demikian pula dengan lahirnya Budi Utomo dengan sifat modernnya memperoleh sorotan yang bernada negatif maupun yang positif. Yang negatif seperti yang dilontarkan oleh orang Belanda yang tidak senang. Mereka

menyebutnya bahwa orang Jawa makin banyak “*cingcong*”. Demikian pula di kalangan *priyayi gedhe* yang tidak senang akan kehadiran Budi Utomo segera membentuk *Regenten Bond Setia Mulia* tahun 1908 untuk mencegah agar cita-cita Budi Utomo tercapai dan mengganggu eksistensinya. Meski demikian adapula kalangan orang Eropa yang termasuk dalam tokoh Etisi yang mendukung lahirnya Budi Utomo. Mereka menganggap hal tersebut wajar dan bahkan menganggap sebagai *renaissance* atau kebangkitan Timur (*oostersche renaissance*). (Dr. Suhartono, 1994 : 30)

Seorang koloniaethicus Mr. Van Deventer, terkait dengan berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 menulis di majalah “**De Gids**” : “*Sesuatu yang ajaib terjadi, insulinde molek yang lagi tidur sudah bangun, Indonesia sudah bangun, sudah mulai sadar akan harga dirinya*”. Dari saat ini bangsa Indonesia mulai mengatur pergerakannya secara modern untuk mewujudkan kesadarannya. Budi Utomo menjadi pelopor dalam hal ini dan berjasa besar dalam meletakkan batu pertama untuk pergaulan politik modern. (L.M. Sitorus, 1988 : 6)

Berdirinya Budi Utomo menjadi secercah cahaya di dalam kegelapan. Cakrawala menjadi terbuka dan pandangan dapat terlontar jauh ke depan. Budi Utomo menjadi sumber inspirasi bagi organisasi pergerakan yang muncul kemudian, dan selanjutnya pergerakan nasional dengan sifat-sifat politiknya berhasil menentang penjajahan dan membangun Republik Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

Latar belakang apa yang menyebabkan Budi Utomo khususnya dan organisasi pergerakan nasional di Indonesia pada umumnya mulai muncul dan berkiprah dalam sejarah ? Mengenai hal ini Drs. G. Moedjanto memberikan pernyataan bahwa pertumbuhan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh faktor *intern* dan faktor *ekstern*. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam negeri antara lain :

1. Rasa senasib dan sepenanggungan atas penderitaan akibat penjajahan.
2. Kesatuan dibawah *Pax Neerlandica* (sama-sama dibawah penjajahan Belanda) memberi jalan kearah kesatuan.

3. Kemajuan di bidang komunikasi sehingga meningkatkan frekuensi pertemuan antara rakyat dari berbagai kepulauan.
4. Adanya pembatasan pemakaian bahasa Belanda, dan usaha popularisasi bahasa Melayu (Bahasa Indonesia kelak) menjadi tali pengikat kesatuan yang ampuh.
5. Adanya undang-undang desentralisasi 1903 tentang pembentukan kota praja (*gemeente* atau *haminte*) dan dewan-dewan kota praja memberikan pengetahuan kepada rakyat akan demokrasi modern.
6. Pengalaman sejarah bahwa semangat pergerakan merupakan reaksi atas semangat kedaerahan yang mempunyai banyak kelemahan.
7. Inspirasi kejayaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit (pengetahuan tentang ini banyak didapat dari sarjana-sarjana Barat).

Sedangkan faktor-faktor *ekstern* yang berasal dari luar dapat disebutkan antara lain sebagai berikut :

1. Adanya ide-ide barat yang masuk lewat pendidikan barat yang modern yang telah menggantikan pendidikan tradisional (pondok, pesantren, wihara, dll)
2. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang mengembalikan kemampuan bangsa kulit berwarna terhadap bangsa kulit putih, yang membuka pikiran bangsa Indonesia untuk dapat mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam menentukan nasibnya.
3. Timbulnya pergerakan dan perjuangan bangsa lain yang menentang penjajahan seperti di India, Turki, Irlandai dan lain-lain. (Drs. G. Moedjanto, M.A., 1992 : 26)

C. Pasang Surut Budi Utomo

Ide dan gagasan yang telah dicetuskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, setelah berpadu dengan ide-ide yang digagas oleh Sutomo dan kawan-kawannya pelajar STOVIA, melahirkan organisasi Budi Utomo. Agar keharmonisan bagi tanah dan orang Jawa dan Madura dapat terwujud maka harus diusahakan kemajuan bagi pengajaran orang Jawa dan juga mengenai kultur (budaya) Jawa. Jadi dalam mengemasnya harus ada perpaduan antara tradisi, kultur (Jawa) dan

pendidikan barat. Itulah yang akan dikembangkan oleh Budi Utomo. Organisasi ini hendak membangun kesadaran lokal yang diformulasikan dalam wadah organisasi modern dalam arti bahwa organisasi itu mempunyai pimpinan, ideologi yang jelas, dan anggota. (Dr. Suhartono, 1994 : 30)

Dalam tahun-tahun pertama setelah berdirinya, Budi Utomo masih berorientasi kedaerahan (khususnya Jawa) dan masih merupakan organisasi yang eksklusif (tidak sembarang orang dapat masuk menjadi anggota). L.M. Sitorus memberikan uraian tentang Budi Utomo pada tahun-tahun pertamanya, antara lain : *Pertama*, menurut daftar tujuan yang akan dicapai oleh Budi Utomo, belum ada yang bermuatan politik, semuanya masih berkisar masalah kebudayaan dan sosial. *Kedua*, dilihat dari susunan kepengurusan dan keanggotaan, menunjukkan Budi Utomo adalah sebuah organisasi atau perkumpulan kelas atas, kaum terpelajar, orang yang banyak berhubungan dengan pemerintah Belanda. *Ketiga*, organisasi Budi Utomo termasuk organisasi yang kooperatif (loyal) dengan pemerintah Kolonial. (L.M. Sitorus, 1988 : 8)

Sifat kedaerahan dan belum menjamah masalah politik dari organisasi Budi Utomo ini terlihat jelas ketika dalam Kongres Pertama di Yogyakarta bulan Oktober 1908 yang antara lain menyatakan bahwa : tujuan dari organisasi adalah *kemajuan nusa dan bangsa di Jawa dan Madura yang laras (harmonis), dengan jalan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, tehnik dan industri, kerbudayaan, mempertinggi cita-cita kemanusiaan dan akhirnya segala sesuatu yang perlu untuk mencapai kehidupan bangsa yang terhormat.* (Hassan Shadily, TT : 183) Orientasi kedaerahan Budi Utomo juga masih tampak jelas ketika Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dalam kongres pertama Budi Utomo tersebut mengusulkan agar Budi Utomo menjadi partai politik dan berdasarkan pada persaudaraan nasional tanpa pandang bangsa, kelamin, atau kepercayaan, masih dianggap terlalu radikal dan tidak mendapatkan dukungan. Bahkan dalam anggaran dasar yang baru selesai dua bulan sesudah kongres menyatakan bahwa Budi Utomo untuk penduduk Bumiputera Jawa dan Madura. Akibat kedongkolannya tersebut maka Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo sebulan sebelum

kongres Budi Utomo kedua tanggal 10 Oktober 1909, mengundurkan diri dari kepengurusan. (Parakirti, T. Simbolon, 1991 : 234-236)

Sejalan dengan berdirinya Budi Utomo yang masih menonjolkan sifat-sifat kedaerahannya maka muncullah organisasi-organisasi lain yang juga berasaskan kedaerah antara lain *Pagoejoeban Pasoendan* tahun 1914 di Jakarta, orang Sumatra di Jakarta mendirikan *Sarekat Sumatra*. Orang Ambon mendirikan *Mena Muria* tahun 1913 di Semarang. Orang Minahasa mendirikan *Rukun Minahasa* di Semarang pada bulan Agustus 1922. (L.M. Sitorus, 1988 : 8)

Kemudian menjelang berdirinya Volksraad 1918 berdirilah *Sarekat Sumatera* di Batavia, *Perserikatan Madoera* di Surabaya tahun 1920, *Sarekat Ambon* yang bersifat nasional di Semarang tahun 1920, *Persatuan Timor (Timorsch Verbond)* di Makasar Ujung Pandang tahun 1920, *Kaoem Betawi* tahun 1923. Organisasi kesukuan tersebut yang dipelopori oleh generasi tua lambat laun juga melahirkan generasi muda dan kemudian juga mendirikan organisasi, antara lain : *Tri Koro Dharmo* yang didirikan tanggal 7 Maret 1915 atas prakarsa Dr. R. Satiman Wirjosandjojo yang kemudian pada bulan Juni 1918 dalam kongresnya yang pertama di Solo berubah menjadi *Jong Java*. Kemudian pada tanggal 9 Desember 1917 berdirilah organisasi pemuda Sumatra di Batavia dengan nama *Jong Sumatranend Bond*. Selanjutnya selama tahun 1918 berbagai organisasi pemuda yang beranggotakan para pelajar bermunculan menurut garis suku, antara lain *Jong Celebes*, *Jong Ambon*, *Jong Batak*. (Parakirti T. Simbolon, 1991 : 254-255)

Mengapa ketika pertama didirikan organisasi Budi Utomo tidak langsung terjun ke dunia politik. Dalam hal ini Dr. Suhartono memberikan komentar bahwa ketika itu Budi Utomo pada saat lahirnya harus menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Saat Budi Utomo berdiri, pemerintah kolonial telah memasang rambu yang dikenal dengan *Regeering Reglement (RR)*. Dalam pasal 111 undang-undang tersebut secara eksplisit mengatakan bahwa ada pembatasan hak untuk rapat dan berbicara, atau dengan kata lain ada pembatasan hak berpolitik. Sehingga pada tahun-tahun awal gerakan Budi Utomo hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat *sosio cultural* (sosial dan kebudayaan). (Dr. Suhartono, 1994 : 32)

Perkembangan Budi Utomo begitu pesat, selang satu tahun setelah berdirinya yaitu tahun 1909, organisasi ini telah memiliki kurang lebih 40 cabang. Anggota-anggotanya kebanyakan terdiri dari kaum terpelajar, bangsawan, dan pegawai negeri. Kemajuan pesat Budi Utomo tersebut harus dapat dimaklumi karena waktu itu organisasi tersebut belum mendapat “*saingan*”. Akan tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Organisasi-organisasi yang muncul kemudian dan langsung bersifat politik serta dengan dasar yang lebih luas dan radikal mempunyai banyak pengaruh terhadap perkembangan Budi Utomo.

Dalam kongresnya yang dilaksanakan di Bandung tanggal 5 dan 6 Agustus 1915, Budi Utomo mempersoalkan masalah milisi Bumiputera (*Inlandsche Militie*). Pentingnya milisi memang diakui, namun suara rakyat harus didengar yaitu harus ada Dewan Perwakilan Rakyat dengan hak perundang-undangan. Mengenai masalah milisi ini sebenarnya telah dibahas dalam rapat besar Budi Utomo di Semarang yang berlangsung tanggal 13 September 1914. Ketua Budi Utomo Dr. Radjiwan Wediodipoero (pengganti Pangeran Notodirodjo) sebagai pemrakarsa rapat besar tersebut. Dalam rapat besar tersebut dibicarakan tentang perlunya diberikan kemampuan kepada rakyat dalam mempertahankan tanah air. Usul ini kemudian terkenal dengan *Indee Weerbar*. (Parakirti T. Simbolon, 1991 : 261)

Kemudian pada tahun 1916 Budi Utomo menjadi anggota Komite Pertahanan India yang memperjuangkan diadakannya milisi bagi pemuda-pemuda Bumiputera. Komite ini dibentuk atas prakarsa gubernur jenderal van Limburg Stirum, pada bulan Juli 1916 dan dikenal dengan istilah *Comite Indie Weerbaar*. Komite ini bertujuan untuk meningkatkan pertahanan Hindia Belanda, dan beranggotakan CSI (Central Serikat Islam), Budi Utomo, *Regentenbond* dan empat organisasi kerajaan Jawa Tengah yaitu *Narpowandowo* (Kasunanan Surakarta), *Prinsendbond Mataram* (Kasultanan Yogyakarta), *Darah Mangkunegaran* (Mangkunegaran), dan *Habdi Dalem Wargo Pakualaman*.

Dalam rapat Komite yang berlangsung tanggal 31 Agustus 1916 muncul gagasan agar komite mengirim delegasi ke Nederland untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada Ratu dan parlemen. Sebagai tindak lanjut maka segera

dibentuk delegasi yang diketuai oleh D. van Hinloopen Labberton seorang pemimpin perhimpunan teosofi. Selanjutnya juga turut serta antara lain Pangeran Ario Koesoemodiningrat mewakili organisasi sosial keempat kerajaan Jawa Tengah sebagai anggota, R.R. Danoesoegondo mewakili *Regentendbond* (anggota), dan Mas Ngabehi Dwidjosewojo mewakili Budi Utomo (anggota), dan Abdoel Moeis mewakili CSI (anggota).

Sesampai di Nederland para wakil segera aktif menjalin hubungan dengan partai-partai politik di Nederaland. Karena kebebasan bicara di Nederland begitu dihargai maka mereka lupa akan tujuan semula untuk membentuk milisi dan segera asik dengan propagandanya masing-masing. Misalnya Budi Utomo akrab dengan partai-partai radikal demokrat dan sosialis moderat. Wakil kerajaan segera akrab dengan partai liberal dan agama. Yang lebih menarik dari utusan-utusan itu adalah pembentukan dewan perwakilan rakyat di Hindia Belanda. Parlemen segera memutuskannya dengan akan dibentuknya dewan perwalian dengan nama Dewan Kolonial tanggal 16 Desember 1916. Namun nama ini dikhawatirkan akan menyinggung perasaan kaum bumiputera maka namanya diganti dengan *Volksraad*. (Parakarti T. Simbolon, 1991 : 266)

Sementara massa organisasi pergerakan makin radikal, para pemimpin organisasi sibuk persiapan pemilihan anggota Dewan Rakyat (*Volksraad*) yang akan diadakan tahun 1918. Dalam hal ini Budi Utomo adalah organisasi pergerakan yang paling bersemangat sehingga pemimpinnya rela menjalin hubungan dengan partai pemerintah antara lain : *Liga Liberal Hindia Belanda* (*Nederlandsch Indische Vrijzinnigenbond – NIVB*). Bahkan sebelum delegasi Comite Indie Weerbaar kembali, setelah menerima berita akan dibentuknya Dewan Rakyat (*Volksraad*), Budi Utomo telah membentuk *Komite Nasional* guna mempersiapkan diri bagi pemilihan anggotanya nanti. Yang masuk dalam komite adalah semua organisasi yang terwakili dalam delegasi *Comite Indie Weebaar* ditambah satu organisasi lain yaitu PGHB (*Perserikatan Guru-guru Hindia Belanda*). (Parakarti T. Simbolon, 1991 : 274)

Pada tanggal 5 – 6 Juli 1917 Budi Utomo melangsungkan kongresnya yang ke 10 di Jakarta. Dalam kongres tersebut selain menentukan program-

programnya dalam bidang pendidikan, sosial, dan kebudayaan kongres juga secara resmi menetapkan status Budi Utomo sebagai partai politik. Perbedaan sifat antara Budi Utomo sebagai partai politik dengan organisasi pergerakan lain yang radikal seperti SI, Insulinde, ISDP, maka Budi Utomo mengedepankan adanya “*keseimbangan antara Barat dan Timur*”. Barat dianggap sebagai guru dan timur sebagai murid, sehingga jika guru yang baik dan bijaksana akan dihormati dan dicintai murid, sebaliknya jika guru yang tidak baik dan congkak akan dimusuhi oleh muridnya. (Parakarti T. Simbolon, 1991 : 275)

Pada awal bulan Januari 1918 pemilihan anggota Volksraad diselenggarakan. Dari sepuluh orang bumiputera, empat orang diantaranya adalah anggota Budi Utomo yaitu *dr. Radjiman Wediodipoero, Aboekasan Atmodirono, Kami, dan Sastrowidjono*, dan lainnya tiga orang dari Regentenbond, dan masing-masing satu orang dari CSI, Insulinde, dan Sulawesi. Untuk selanjutnya pemerintah jajahan meresmikan berdirinya Volksraad di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1918. Masa sidang pertama berlangsung dengan sukses pada tanggal 21 Mei sampai dengan 3 Juli 1918. Sedangkan diantara anggota-anggota Volksraad, terdapat lima orang anggota bumiputera yang diangkat oleh pemerintah antara lain *dr. Tjipto Mangoenkoesoemo* (Insulinde), *R.M. Oemar Said Tjokroaminoto* (CSI), *M. Tajep* (Aceh), *M. Ng. Dwidjosewojo* (Budi Utomo). (Parakarti T. Simbolon, 1991 : 276)

Kemudian pada tanggal 16 November 1918 atas prakarsa Ch. G. Cramer anggota Volksraad dari I.S.D.V (*Indische Sociaal Democratische Vereeniging*) di dalam Volkraad dibentuk Konsentrasi Radikal (*Radicale Concentratie*) yang akan mempersatukan aliran-aliran “*kiri*” dalam Volksraad. Budi Utomo termasuk salah satu anggotanya disamping SI (*Sarekat Islam*), Insulinde, dan I.S.D.V. yang bertugas mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang terjadi di Negeri Belanda atas pengambilalihan kekuasaan dari *M.J. Troelstra* seorang pemimpin I.S.D.V. dengan kekerasan di Negeri Belanda atas Ratu Wilhelmina. Namun pada tanggal 17 November 1918 Van Limburg Stirum menerima kawat dari menteri jajahan waktu itu A.W.F. Idenburg yang membantah akan kabar tersebut. I.S.D.V. hanya meminta perubahan dengan jalan tanpa kekerasan. Berita baru tersebut tidak

menggoyahkan pemikiran Van Limburg Stirum untuk mendorong kehidupan demokratis di Hindia Belanda. Esok harinya, tanggal 18 November 1918 dihadapan Sidang Dewan Rakyat melalui anggota dewan *D. Talma* mengumumkan janjinya yang berisi akan mempercepat datangnya otonomi bagi Hindia Belanda. Janji itu kemudian dikenal dengan **Janji November** (*November Belofte*). (Parakarti T. Simbolon, 1991 : 283)

Dalam kongres di Yogyakarta pada bulan Oktober 1920 Budi Utomo mulai membicarakan perkoperasian dan pemberantasan lintah darat, juga membahas usul-usul *Herzienings Commissie-Carpentier* Alting dan mengambil keputusan untuk menerbitkan majalah *Guru Desa* untuk rakyat kecil. Kemudian pada bulan November 1920 Budi Utomo ikut rapat protes mengenai rintangan-rintangan terhadap pergerakan rakyat (penuntutan pemimpin-pemimpin politik, pengawasan polisi yang mengganggu, tahanan preventif yang berlarut-larut, ancaman-ancaman pembuatan, dll).

Pada bulan Desember 1921 dalam Kongresnya di Sala Budi Utomo terpaksa terjun dalam lapangan politik karena perhatian pemerintah terhadap soal-soal pengajaran dan pendidikan sangat kurang. Dituntutnya agar sebagian besar anggota *Volksraad* terdiri dari orang-orang Indonesia. Demikian juga untuk dewan-dewan daerah (*Gemeenteraad, Gewestelijkeraad, dll*).

Pada bulan Januari 1922, Budi Utomo ikut membentuk komite menyokong pemogokan pegawai pegadaian. Wakil Budi Utomo dalam *Volksraad* mencela tindakan keras pemerintah terhadap para pemogok, penuntutan pemogok berdasarkan tunggakan persekot, penangkapan pemimpin pemogokan Abdul Muis dan Reksodipurro karena pelanggaran bicara (*spreekdelict*) dan menyatakan simpati pada para pemogok. Karena sikap ini maka pemerintah menuduh Budi Utomo telah berbelok ke jalan revolusioner. (A.G. Pringgodigdo, 1991 : 184)

Menurut Parakirti T. Simbolon bahwa pemogokan para buruh tersebut berkisar pada kenaikan upah, persamaan upah antara karyawan Eropa dan Bumiputra, peningkatan mutu lingkungan kerja, masa kerja delapan jam sehari, sehari libur yang dibayar dalam seminggu, dan upah lembur. Disamping tokoh-tokoh pemogokan yang telah disebutkan di atas juga terdapat tokoh pemogokan

yang terkenal yaitu R.M. Soerjopranoto. Dia adalah seorang pemimpin CSI (Central Sarekat Islam) yang kemudian mendirikan PFB (*Personal Fabrieks Bond*) pada bulan November 1918. Karena keberaniannya dalam memimpin pemogokkan dia mendapat julukan komandan Tentara Buruh (*Arbeidsleger*). (Parakirti T. Simbolon, 1991 : 284).

Pada bulan November 1922 dalam kongres luar biasanya di Yogyakarta membahas masalah adanya rencana perubahan Regeerings Reglement, perubahan-perubahan yang bersifat amat kolot yang diajukan oleh Minister van Kolonien (menteri jajahan) Simon de Graaf kepada Staten Generaal (Perwakilan rakyat) Belanda. Waktu itu Dwijosewoyo pemimpin Budi Utomo menyampaikan antara lain :

“Waspadalah. Sekarang saatnya bagi tuan (penjajah) untuk memberikan apa yang kita ingini. Sekarang tuan masih bisa menuntun kita. Jangan menunggu lagi. Saat akan tiba rakyat kita kehilangan kesabarannya. Saat itu ialah saat yang berikut saat sekarang ini.”

Kemudian dalam kongres tahun 1923 Golongan muda dalam Budi Utomo mulai mempersoalkan masalah perjuangan non kooperasi. Namun mereka masih kalah oleh golongan tua yang tidak ingin Budi Utomo terjerumus ke arah kiri. Sebagian besar anggota Budi Utomo adalah golongan pegawai negeri yang sukar bersikap non kooperatif. Hal itu terus berlanjut pada kongres Budi Utomo tahun 1924, dimana golongan tua lebih mendominasi program. Rencana tiga tahun yang dititik beratkan pada usaha-usaha memajukan kebudayaan segera dicanangkan. Kemudian pada tahun 1925, barulah kepengurusan Budi Utomo jatuh pada golongan muda, dan kedudukan pengurus besar dipindahkan ke Semarang pada bulan April 1925 yang diputuskan dalam kongresnya di Semarang. Selanjutnya dalam kongresnya bulan April 1926 ditetapkan pula bahwa Budi Utomo menetapkan sikap non kooperatif dengan pemerintah Belanda, namun tetap tidak melarang anggota-anggota pribadi (tetap) duduk dalam dewan-dewan perwakilan. Keputusan ini tidak lama kemudian dicabut kembali.

Meski terjadi gelombang pasang surut namun sifat nasional Budi Utomo tetap terpancar. Budi Utomo turut serta memprotes tindakan-tindakan pemerintah Belanda terhadap mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Hal ini seiring dengan

peristiwa penangkapan beberapa orang pengurus PI (Perhimpunan Indonesia) tahun 1927. Disamping itu pada tahun yang sama pada bulan Desember, Budi Utomo bergabung dengan PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Golongan muda dalam Budi Utomo tak jemu-jemunya selalu mendesak agar Budi Utomo lebih banyak memperhatikan soal-soal politik, menjunjung tinggi asas Indonesia Raya (bukan Jawa Raya), dan menutup pintu bagi orang-orang Indonesia yang dipersamakan haknya dengan orang-orang Eropah (Gelijkgested).

Secara perlahan-lahan perjuangan kaum muda menuai keberhasilan. Dalam kongres tahun 1928 memutuskan akan menjalankan politik non kooperasi jika rencana undang-undang tentang Inlandsche Meerderheid (jumlah terbesar golongan bumiputera) dalam Volksraad ditolak perwakilan rakyat Belanda. Putusan penting lainnya adalah adanya penambahan tujuan perhimpunan dengan satu kalimat yaitu : “*membantu terlaksananya cita-cita persatuan Indonesia*”. Hal ini kemudian menjadikan dalam kongres-kongres selanjutnya (1930, 1931, 1932) sifat kejawaannya dihapus dan sifat keanggotaannya terbuka bagi seluruh orang Indonesia di bagaian Nusantara manapun. Kemudian dalam kongres tahun 1931 menugaskan para pengurus untuk dapat mempersatukan perkumpulan-perkumpulan yang berkebangsaan Indonesia. Kemudian satu langkah maju dapat dicapai dalam kongresnya di Sala bulan Desember 1932, bahwa secara radikal tujuan Budi Utomo menjadi : ***Mencapai Indonesia Merdeka***. Prakarsa untuk mengadakan fusi ternyata mendapat tanggapan dari peserta kongres. (A.G. Pringgodigdo, 1991 : 184-185)

Dalam kongres ke XXIII Budi Utomo di Solo pada tanggal Juni 1933, disamping memperingati 23 tahun berdirinya organisasi, juga membahas adanya ordonansi sekolah liar (*Wilde Scholen Ordonnantie*), dan kemungkinan memperbaiki hidup kaum tani. Dalam kesempatan itu pula dipakai untuk menentang adanya pembatasan hak berserikat dan berkumpul. Pada masa itu pengekanan terhadap pergerakan nasional sangat terasa. Waktu itu terjadi peristiwa bahwa pemerintah Belanda melarang diadakannya Kongres Indonesia Raya/Kongres Rakyat Indonesia kedua. Hal ini menngkondisikan bahwa

terjadinya fusi harus dipercepat. Pada bulan Januari 1934 dibentuklah komisi fusi antara Budi utomo dan PBI (Persatuan Bangsa Indonesia). Pertengahan tahun 1935 rencana fusi disetujui oleh kedua pengurus besar (BU dan PBI). Kemudian fusi diresmikan dalam kongres Budi Utomo yang terakhir di Sala yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Desember 1935 dan lahirlah **PARTAI INDONESIA RAYA** yang kemudian biasa disingkat **Parindra**. (A.G. Pringgodigdo, 1991 : 185)

Dengan demikianlah tamatlah riwayat Budi Utomo yang telah malang melintang dalam perjuangan pergerakan kebangsaan di Indonesia. Kehadirannya telah memberi warna baru dalam jalannya sejarah bangsa Indonesia.

BAB IV

KONGGRES PERTAMA BUDI UTOMO DI YOGYAKARTA

Setiap orang pada dasarnya telah dikaruniai jiwa kebangsaan. Jiwa kebangsaan tersebut merupakan kodrat alam, naluri setiap manusia sebagai “homo sosio” yang ingin hidup selalu berkelompok. Naluri tersebut dapat tumbuh dan berkembang, dapat pula terhambat perkembangannya. Hal ini sangat bergantung kepada pendidikan yang diperolehnya.

Pada awal abad ke 19 keadaan bangsa Indonesia (Inlander untuk menyebut Indonesia pada masa itu) sangat menyedihkan. Akibat dari penindasan serta penghisapan yang dilakukan oleh penjajah Belanda selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Hal ini telah membawa kemunduran dan kemerosotan bagi bangsa Indonesia dalam segala bidang: politik, ekonomi, sosial budaya maupun dalam bidang pendidikan.

Keadaan yang menyedihkan itu disadari pula oleh para pelajar Jawa yang pada waktu itu sedang menjalankan pendidikan di Stovia (School Tet Opleiding Van Inlandsche Artsen= Sekolah Pendidikan Dokter Bumiputera) [Sutrisno Kutoyo, 1976: 179]. Melalui pendidikan yang mereka peroleh, kesadaran akan jiwa kebangsaan dan kemerdekaan telah tumbuh dan berkembang dengan baik, berbeda dengan masyarakat luas yang pada waktu itu belum mendapatkan pendidikan. Dari merekalah (pelajar STOVIA) kemudian timbul gagasan untuk mendirikan suatu perhimpunan pelajar (Budi Utomo) yang bertujuan mempercepat usaha kearah kemajuan rakyat. Mereka dengan bersemangat hendak menyelenggarakan kongres Budi Utomo I demi kelangsungan dan kemajuan sebuah organisasi modern yang nantinya memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi ke depan.

A. PERSIAPAN KONGGRES PERTAMA BUDI UTOMO

Ketua Budi Utomo (Sutomo) dalam mempersiapkan kongres I mendapat dukungan dari para anggotanya yang nota bene adalah para pelajar STOVIA.

Persiapan tersebut diawali dengan melakukan propaganda serta pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan simpati serta dukungan dari berbagai pihak. Sasaran mereka adalah kalangan terpelajar, kalangan elite bangsawan serta tokoh-tokoh terkemuka kalangan pribumi. Pendekatan tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati, hanya kepada mereka yang dipandang sebagai priyayi tinggi yang telah tergugah hatinya, menjadi tujuan mereka untuk “tetap sebagai penggerak agar bisa mendorong atasan-atasan mereka dari belakang”.

Langkah awal pada pendekatan pertama dilakukan kepada teman-teman sekelasnya berlanjut ke teman-teman di kelas yang lainnya yang sekiranya menaruh perhatian kepada organisasi Budi Utomo. di kelas Sutomo tercatat 17 murid, di kelas yang lebih tinggi ada 11 murid di kelas yang lebih rendah sekitar 20 murid. Belum terhitung murid-murid di kelas yang jauh lebih tinggi dan yang jauh lebih rendah. Sehingga sebelum konggres berlangsung, tepatnya tanggal 5 Oktober 1908 keanggotaan Budi Utomo telah mencapai 1.200 orang. Prosentase yang bukan siswa bertambah dari kira-kira sepertiga dari jumlah seluruh anggota menjadi kira-kira lebih dari separo (pengaruh para siswa berangsur melemah).

Persiapan Konggres Budi Utomo (BO) yang Pertama banyak mengorbankan harta, benda, tenaga dan juga pikiran dari Sutomo dan kawan-kawan. Antara lain: uang tunjangan bulanan dari Pemerintah untuk bulan puasa disediakan untuk penyelenggaraan konggres. Lain daripada itu diantara kawan-kawannya ada yang memberikan jam, kain panjang, kain kepala, dan barang-barang lainnya untuk dijual guna membiayai konggres [Imam Supardi, 1952: 30]. Tidak ketinggalan Dr. H. F. Roll selaku pemimpin umum Sekolah Dokter Stovia juga telah memberikan bantuan berupa pinjaman sejumlah uang untuk kepentingan konggres. Sutomo sendiri beberapa kali mengadakan perhubungan dengan tuan E. F. E Douwes Dekker di Jakarta. Surat menyurat dan kunjungan-kunjungan kepada kalangan terkemuka baik di dalam maupun di luar kota Jakarta juga terus dilakukan untuk mendapatkan simpati serta dukungan dari mereka. Setiap hari Sutomo dan kawan-kawan terus berusaha dan tidak kenal menyerah, satu-satunya yang mengikat mereka bersama dan memberi semangat kuat ialah Konggres Jawa Pendidikan Rakyat.

Pembicaraan mengenai susunan acara kongres dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1908 antara Dr. Wahidin Soedirohoesodo dengan pengurus Budi Utomo Weltevreden di gedung STOVIA [Drs. Suratmin, 1982: 71]. Dalam pertemuan tersebut telah dicapai kata sepakat bahwa kongres akan terbuka untuk umum [Sutrisno Kutoyo, 1976: 180] dan mengenai masalah adat, para siswa memutuskan bahwa hanya adat yang dipandang merugikan bagi tercapainya tujuan organisasi harus dihapus, sementara yang menguntungkan dapat untuk dipertahankan. Kota yang ditetapkan sebagai tempat kongres adalah Yogyakarta dengan pertimbangan letak yang strategis (di tengah-tengah jalur kereta api) juga Yogyakarta memiliki daya wibawa sendiri (dipayungi Sultan). Ketika itu telah banyak pemuda dari berbagai daerah yang melanjutkan sekolah di Yogyakarta, diantaranya masuk sekolah guru (HIK), sekolah menengah (MULO) dan sekolah menengah atas (AMS). Dipilihnya Yogyakarta juga disertai alasan-alasan sebagai berikut:

1. Yogyakarta adalah kota tempat tinggal Dr. Wahidin Soedirohoesodo;
2. Yogyakarta atau Mataram merupakan lambang kesatuan Jawa;
3. Sebagai pernyataan hormat dan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pangeran Noto Dirodjo (Paku Alam).

Secara khusus disepakati pula bahwa tempat kongres adalah di sekolah guru HIK (Hollands Inlandsche Kweekschool) di Jetis yang kemudian pernah menjadi SGA dan sekarang ini menjadi Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Umum 11.

Dr. Wahidin Soedirohusodo terpilih sebagai ketua kongres pertama. Beliau dengan usaha sendiri menghadap P. H. van Andel (Residen Yogyakarta) untuk memperoleh izin pelaksanaan kongres. Ketika menghadap Residen, Dr. Wahidin Soedirohoesodo dengan prinsip “mengalah untuk menang” disertai duduk di bawah meminta izin untuk mengadakan kongres pertama di Jetis, Yogyakarta. Sebagaimana dituturkan oleh K. R. T. Radjiman Wediyodiningrat dalam pidatonya yang berjudul “Empat Puluh Tahun Bangsa Indonesia Bangkit”, beliau (Dr. Wahidin Soedirohoesodo) datang sendiri kepada “Hoofd van Plaatselijk Bestuur” di Yogyakarta, walaupun beliau mengerti, bahwa nanti

beliau pasti akan disuruh duduk di bawah. Disitulah beliau bersikap seperti orang yang sedang beradu Djago, yaitu; mengalah-ngalah, ulah ngisor. Maksudnyapun tercapai, rapat umum diizinkan dengan mendapat peringatan keras dari asisten residen: “sekali lagi kamu saya peringatkan , kamu tidak boleh merembuk soal politik. Mengerti?” [Moh. Anas, 2002: III-2]. Demikian betapa besar pengorbanan yang telah diberikan oleh Dr. Wahidin Soedirohoesodo untuk kemajuan bangsanya.

Pada tanggal 28 September 1908 media Bataviaasch Nieuwsblad memberitakan, bahwa dua cabang organisasi, masing-masing di Yogyakarta dan Jakarta mengajukan usulan agenda konggres [Akira Nagazumi, 1989: 71]. Cabang Yogyakarta melalui sidangnya pada Javaansche Congres tanggal 26 September 1908 mengusulkan sebagai berikut:

1. Membahas masalah beasiswa bagi orang Jawa dan Madura;
2. Membahas masalah peraturan tentang tingkah laku orang Jawa sehubungan dengan perbedaan tingkatan dalam masyarakat pribumi (tata krama dan tata cara);
3. pemilihan Dewan Pengurus (Agenda 1908)

Keterbatasan usulan tersebut mencerminkan sikap para anggota kaum tua di Yogyakarta cenderung bercabang serta mengincar kedudukan pimpinan organisasi masa mendatang. Mereka tidak ingin organisasi bangsa Jawa pertama ini akan mengganggu pemerintah kolonial, tetapi sementara juga tidak ingin menciderai harapan siswa-siswa di Weltevreden.

Usulan dari para siswa di Weltevreden (cabang Jakarta) memiliki cakupan yang lebih luas dengan mengajukan:

1. pendidikan dasar, juga pendidikan dagang dan pertanian untuk rakyat jelata;
2. pendidikan dasar dan lanjutan Eropa;
3. perluasan sekolah pendidikan guru dan hoofdenscholen;
4. membuka pendidikan tingkat atas;
5. pendidikan untuk pejabat pribumi;
6. memperlebar pintu untuk pelajar Jawa memasuki sekolah menengah Belanda (H.B.S.=Hoogere Burgerschool);

7. penerangan dan pendidikan bagi gadis dan perempuan pribumi;
8. memperluas pendidikan jasmani;
9. praktek kesederhanaan bagi kalangan lapisan tinggi masyarakat;
10. mengembangkan golongan menengah dengan kapital;
11. mengembangkan industri rakyat dan pertanian untuk pasar dalam dan luar negeri;
12. santunan bagi kaum miskin;
13. pendidikan kesenian;
14. mendirikan perpustakaan;
15. studi tentang tanah jajahan lain selain Hindia Belanda;
16. kerja sama dengan pemerintah agar tindakan-tindakan yang bermanfaat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya (Agenda 1908).

Seorang pemimpin redaksi Jong-Indie, Th. Thomas pada tanggal 3 Oktober 1908 memberitakan dua program tersebut dalam sebuah karangan. Isi dari karangan tersebut, memuji organisasi cabang Jakarta yang tidak hanya memikirkan masalah pendidikan tetapi juga mengemukakan banyak hal yang berguna bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat Neda bersahabat yang dilontarkan cabang Jakarta menggambarkan metafora orang tua dan anak (hubungan antara pemerintah dengan penduduk pribumi). Hal ini merupakan tema berulang dalam periode Politik Etis.

B. PELAKSANAAN KONGGRES PERTAMA BUDI UTOMO DI YOGYAKARTA

Kongres berlangsung pada bulan puasa tepatnya tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober 1908 di Sekolah Guru (Kweekschool) Jetisharjo, Yogyakarta [Drs. Sudiyo, 1989: 17]. Dengan pertimbangan para utusan dapat menginap di internat (asrama) yang kosong karena sekolah libur. Adapun sidang-sidangnya dengan memanfaatkan ruang makan. Susunan panitia kongres adalah sebagai berikut:

Ketua : Dr. Wahidin Soedirohusodo
 Wakil Ketua : R. M. Pandji Brotoadmodjo

Penulis I : Dwidjosewojo
Penulis II : Sosrosoegondo
Bendahara : Ario Notodirodjo

Kongres dihadiri oleh cabang Budi Utomo di Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta I dan II, Magelang, Surabaya dan Probolinggo. Juga hadir di situ: Kg. Gusti Pangeran Adipati Arja Prabu Soerjodilogo, Kg. Pangeran Majoor Noto Dirodjo dari Pakualaman, Kg. Tuan Assistent-Resident Mataram dan Kg. Tuan Bert Inspecteur Inl, Kg. Bupati di Temanggung, Blora, Magelang dan Yogyakarta, R. Ramli Adjunct Inspecteur, M. Admodirono Arsitek di Semarang, beberapa bangsawan di Kasultanan dan Pakualaman, beberapa Redaktur surat kabar Belanda dan Melayu, Jaksa Kepala di Bondowoso dan Surakarta, beberapa dokter ,guru Jawa, priyayi-priyayi dan orang-orang partikelir, jumlah keseluruhan kurang lebih 400 orang.

Kongres dibuka secara resmi dalam bahasa Jawa oleh Dr. Wahidin Soedirohusodo pada tanggal 3 Oktober 1908 jam 21.00. Dalam pembukaannya Dr. Wahidin Soedirohusodo mengemukakan beberapa hal, antara lain:

“Dulu biasa orang kepingin menjadi priyayi bestur saja, akan tetapi sekarang telah banyak orang yang lain pendapatnya, banyak yang suka menjadi vakman seperti: dokter, guru, bouwkundige dan sebagainya, sebab priyayi bestur, jikalau sudah berhenti dari pekerjaan negeri, tinggal priyayi saja, artinya malu bekerja lainnya, menjadi seperti vakman selama suka dan bisa bekerja akan mendapat makannya.. Pendeknya perlu sekali keturunan kita mendapat pengajaran dan pengetahuan lebih dari sekarang, sebab bagi kita sendiri yang sudah tua-tua, tambahnya pengetahuan dan pengajaran itu tiada seberapa lagi gunanya”.

Dalam kongres Budi Utomo yang pertama terdapat lima pembicara utama, yaitu: 1. R. Sutomo (Stovia Weltevreden), 2. M. Djoko Saroso (Kweekschool Yogyakarta), 3. R Kamargo (Hoofdenschool Magelang), 4. Dr. M. B. Mangoenhoesodo (dari Surakarta) dan yang terakhir, 5. M. Goenawan Mangoenkoesoemo (Stovia Weltevreden) [Drs. Suratmin, 1982: 73].

Secara berturut-turut kelima pembicara utama melakukan presentasi. R. Sutomo membicarakan: “Maksud Budyatama itu akan membicarakan segala hal pengajaran yang berguna bagi bangsa Jawa, seperti pengajaran tentang

pengetahuan, kepandaian berdagang, bertani, membuat barang dan perkakas yang berguna bagi orang hidup, pendeknya pengajaran segala rupa pengetahuan dan pekerjaan yang harus diketahuinya masing-masing akan hidup sepatutnya” [Moh. Anas, 2002: III-4].

M. Djoko Saroso (murid Kweekschool) sebagai ketua BO Cabang Yogya II membacakan pendapatnya antara lain menyebutkan bahwa orang Jawa pada zaman dahulu (Majapahit) termashur namanya akan tetapi pada waktu kini orang Jawa tinggal dalam kesengsaraan. Budyatama hendaknya membicarakan daya upaya agar pengajaran bagi Bumiputra menjadi cukup dan orang Jawa menjadi maju.

Pembicara selanjutnya R. Kamargo dari Cabang Magelang mengatakan: “Patut kita menaruh hati belas kasihan kepada orang kecil, mereka selamanya senantiasa bekerja berat untuk mendapat sesuap nasi buat anak bininya akan tetapi mereka tetap tinggal melarat saja. Adapun yang menjadi sebabnya tiada lain kurang pengajaran. Dari bodohnya ia tiada tahu daya upaya akan menjadi maju sehingga ia senantiasa ditipu (dihisap darahnya) oleh bangsa Arab dan Cina yang tinggal di tanah Jawa. Maka dari itu orang kecil harus diberi pengajaran supaya terlepas dari kebodohnya yang sangat itu”.

Dr. Mas Bei Mangoenhoesodo yang terkenal dengan nama Dr. Radjiman Wediodiningrat (setelah menjadi dokter keraton dari Surakarta), diantara semua orang Jawa adalah yang paling mendalam dalam pendidikan Barat. Pada saat konggres sangat terpengaruh oleh kebudayaan Jawa, subyektivisme I. Kant, dialektika G. W. F. Hegel, anti rasionalisme H. Bergson dan menganut doktrin-doktrin mistik Teosofi sebagai perpaduan Timur dan Barat [M. C. Ricklefs, 1993: 250]. Teosofi adalah salah satu diantara gerakan-gerakan yang menyatukan elite Jawa, orang-orang Indo-Eropa dan orang-orang Belanda pada masa itu dan sangat berpengaruh di kalangan banyak anggota budi Utomo. Isi pidatonya: “orang Jawa akan dan harus tetap tinggal sebagai orang Jawa dan tidak menjadi “proletariat yang terpelajar”. Peringatan terhadap kemungkinan yang timbul dari pemujaan terlalu besar terhadap kebudayaan Barat dapat mengakibatkan disintegrasi kebudayaan Jawa lebih jauh. Lebih lanjut dikatakan

dengan mengutip teori Darwin: bakat kreatif bangsa Jawa setelah berabad-abad lamanya mengalami kemandegan, telah menjadi luar biasa kerdil di hadapan bangsa Eropa. Keengganan dan hormatnya terhadap kebudayaan Eropa memunculkan sebuah pemikiran bahwa rakyat pribumi hampir tidak patut menerima pendidikan semacam itu. Nada pesimis tersebut benar-benar terasa sumbang ditengah suasana konggres yang berpandangan jauh ke depan, sehingga menimbulkan kejengkelan dikalangan pelajar peserta konggres.

M. Goenawan Mangoenkoesoemo dari Stovia Weltevreden dalam pembicaraannya hampir sama dengan R. Sutomo, dengan tanpa melontarkan serangan terhadap pembicara-pembicara terdahulu. M. Goenawan Mangoenkoesoemo, memfokuskan perhatiannya kepada keterbelakangan rakyat jelata serta pembangunan sekolah-sekolah dirasakan masih begitu penting dibandingkan dengan masalah beasiswa.

Pandangan Tjipto Mangoenkoesoemo, kakak Goenawan menginginkan supaya BO menjadi sebuah partai politik yang berjuang untuk mengangkat rakyat pada umumnya daripada hanya golongan priyayi dan kegiatan-kegiatannya lebih tersebar di seluruh Indonesia daripada terbatas di Jawa dan Madura saja. Tjipto juga tidak sepakat jika kebudayaan Jawa dipakai sebagai dasar peremajaan kembali. Westernisasi dilihatnya sebagai senjata ampuh untuk menyelamatkan orang Jawa dari kondisi-kondisi yang mandeg. Tjipto Mangoenkoesoemo yakin untuk mencapai Westernisasi ini dengan merongrong hierarkis sosial tradisional, seni serta sejarah Jawa kedua-duanya adalah harta milik istana raja-raja yang sama sekali asing bagi rakyat kebanyakan. Pandangan Tjipto tersebut secara tidak langsung berisi protes terhadap kaum bangsawan yang selama ini hanya mementingkan nasibnya sendiri tanpa memikirkan kondisi rakyat kebanyakan.

Tjipto Mangoenkoesoemo dalam pidatonya telah mampu menggugah kesadaran di kalangan peserta konggres yang mengakibatkan munculnya dua pendekatan yang masing-masing sangat berbeda terhadap masalah pendidikan Barat. Seorang penulis anonim dari Jong-Indie menamakan dua pendekatan ini "pendidikan dari atas" dan pendidikan dari bawah". Pidato Tjipto telah

membawa terbaginya para pembicara ke dalam dua kubu. Pertama; Dr. Wahidin, Dr. Radjiman serta Dwidjosewojo, ketiga-tiganya mewakili kelompok yang berpendapat “apabila elite masyarakat Jawa telah berpendidikan, rakyat jelata akan mengikutinya”. Kedua; Tjipto, Goenawan dan R. Soetomo serta beberapa pembicara lainnya memimpin kelompok minoritas yang lebih mementingkan kebutuhan akan pendidikan rakyat desa [M. C. Ricklefs, 1993: 250].

Peserta kongres yang sebagian besar berasal dari kalangan priyayi kecil tentu saja sangat tidak berminat terhadap sistem pendidikan dari bawah. Tentu saja mereka menginginkan kedudukan yang lebih tinggi dalam pergaulan masyarakat priyayi. Maka tidak mengherankan apabila program Budi Utomo tidak bersifat progresif dari awal. Akan tetapi diberitakan bahwa beberapa siswa STOVIA menuntut melalui kongres agar status sekolah mereka ditingkatkan dan mereka menuntut diperlakukan sesuai dengan hak yang diberikan oleh pendidikan mereka. Walaupun terjadi perdebatan-perdebatan sengit diantara peserta kongres, akan tetapi semangat persatuan dan kesatuan sangat terasa. Sehingga kehendak kompromi di kalangan peserta kongres demi menghindari perpecahan terbuka, tampak pada tanggapan Seorang anggota muda yang tidak dikenal namanya, mengusulkan agar “Budi Utomo tampil sebagai sebuah organisasi sosial, tetapi apabila perlu menempuh cara-cara politik untuk mencapai cita-citanya”. Pendapat ini pada akhirnya ditafsirkan oleh sebagian besar peserta kongres bahwa BO bukanlah suatu organisasi politik.

Salah satu diantara keputusan terpenting yang telah diambil kongres yaitu bahwa BO tidak akan mencampuri urusan adat. Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan apakah para delegasi BO bersikap setengah-setengah dalam menghadapi masalah perubahan sosial secara fundamental, ataukah mencerminkan kompromi sementara dalam menantikan perubahan pada masa depan. Namun demikian keputusan tersebut telah berhasil mencegah setiap perubahan pada masyarakat pribumi secara besar-besaran. Suasana pada masa tersebut digambarkan oleh semboyan resmi BO yaitu: “Evolusi bukannya revolusi”. untuk menciptakan hubungan yang selaras antara kalangan bangsawan. (priyayi) dengan rakyat kebanyakan. Eyken dalam ceramahnya pada tahun 1909

menyatakan tentang persetujuan terhadap keputusan itu [Akira Nagazumi, 1989: 80].

“Untunglah bahwa masalah adat tetap tidak disentuh. Adat mengandung tata krama dan kebiasaan tradisional kuno yang masih hidup, khususnya mengatur hubungan antara bawahan dan atasan dalam masyarakat pribumi. Bagi bawahan yang ada hanyalah kewajiban dan bagi atasan adalah hak istimewa dari pembawaan. Tetapi (perubahannya) hanyalah masalah waktu dan adat yang pernah dijunjung sangat tinggi dan sering disalahgunakan itu akan menghilang untuk memberi tempat bagi suatu bentuk hubungan (sosial) yang lebih wajar dan lebih sederhana”.

Apabila dirangkum di dalam Konggres menghadapi dua usulan. Pertama, usul dari pihak yang bercakupan sempit, yakni dari cabang Yogyakarta, yang menekankan acara pengumpulan beasiswa, tatakrama sosial dan pemilihan pengurus. Kedua, usul dari kelompok yang bercakupan luas, yakni dari cabang Batavia, usul terdiri dari 16 butir, mulai dari soal pola pendidikan, santunan orang miskin, sampai kerjasama dengan pemerintah. Dengan mata acara sebanyak itu, konggres tidak bisa menghindari dari debat ramai tapi sepi keputusan.

Pikiran dan usul Tjipto Mangoenkoesoemo tampaknya masih terlalu radikal, sehingga tidak mendapat dukungan. Yang paling jauh bisa disepakati adalah bahwa BO “tampil sebagai organisasi sosial, tapi bila perlu akan menempuh cara politik untuk mencapai cita-citanya”. Tentang masalah tatakrama sosial, yang merupakan masalah adat, konggres sepakat agar BO tidak mencampuri soal itu.

Serangkaian pertanyaan dari beberapa peserta konggres BO yang pertama di Yogyakarta, antara lain Bupati Temanggung Tjokro Adi Koesoemo: “Bagaimana dengan Budi Utomo di luar Jawa?” [Drs. S. Z. Sutjipto, 1996: 54]. Sedangkan seorang juru bahasa bernama C.F. Winter bertanya: “Mengapa BO dalam usahanya hanya mau memajukan orang Jawa dan Madura saja. Lalu bagaimana dengan suku-suku bangsa yang lain? Bukankah akan lebih baik jika

usaha tersebut dijalankan secara serempak supaya kemajuan Indonesia lebih cepat tercapai”.

Secara ringkas Dwidjosewojo menuturkan: “Budi Utomo memang belum dapat menyampaikan maksud besar itu. Itu artinya BO belum bisa memikirkan lain dari pada bangsa Jawa dan Madura. Ada beberapa hal yang menjadi halangannya. Pertama: jarak yang terlampau jauh, lagi pula perhubungan masih terlalu sukar dilaksanakan. Kedua: sudah ada berita-berita bahwa di luar Jawa orang juga sudah akan mendirikan perkumpulan yang seazas dengan BO.

Pada tanggal 4 Oktober 1908, yaitu hari kedua kongres sidang memilih badan pengurus organisasi. Badan ini terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, sekretaris kesatu dan kedua, bendahara dan empat orang komisaris. Pemilihan para pengurus tidak berjalan dengan mulus, oleh karena pihak kaum muda ingin mendapat kepastian bahwa pendirian mereka akan terwakili sebanyak-banyaknya.

Ketika dilakukan pemilihan ketua BO oleh kongres dari sejumlah calon tidak ada muncul nama dari pelajar STOVIA, tetapi nama Tjipto Mangoenkoesoemo muncul, mungkin dimunculkan untuk mewakili aspirasi beberapa pelajar STOVIA. J.Th. Petrus Blumberger menyatakan sebagai berikut: “De jongeren zouden blijven ‘de motor, die voorwaarts drijft’; de ouderen zouden zijn ‘de stuurleiden, die met vaardige hand gevaarlijke klippen wetente omzeilen om de boot in veilige haven te brengen¹” yang terjemahannya kurang lebih sebagai berikut: “Golongan muda akan tertinggal motornya, yang dikendarai maju; golongan yang lebih tua akan menjadi pengemudi, yang dengan tangannya yang tangkas dan berpengalaman menghindaribatu-batu karang penghalang melayarkan bahtera menuju ke pelabuhan yang aman” [Drs. S. Z. Hadisutjipto, 1996: 56]. Kemungkinan untuk “kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa”, para pelajar STOVIA itu memang lebih baik sementara waktu seyogyanya kembali ke bangku kuliah untuk menyelesaikan pelajarannya. Jadi bukan karena kesibukan di bidang kedokteran membuat BO kurang mendapat waktu, akan tetapi lebih tepat apabila dikatakan kepentingan di bidang

kedokteran (menyelesaikan studi mencapai gelar dokter). Pada waktu itu kandidat calon ketua BO berjumlah 13 orang, mereka adalah :

1. Mas Admodiromo, arsitek
2. Mas Soedirohoesodo, dr
3. Mas Tjipto Mangoenkoesoemo, dr
4. R. A Danoekoesoemo, Regent di Malang
5. R.T.A Tirto Koesoemo, Regent di Karanganyar
6. Mas Mangoenkoesoemo, mantri guru
7. Mas Boediardjo, guru Kweekschool
8. Mas Ngabei Dwidjosewojo, guru
9. R. Kamil, Adj. Inspecteur Sekolah B.M
10. Kg. Pangeran Majoor Notodirodjo, Pakualaman
11. R.M.T Ardjo Abdoelmoehni, Regent di Probolinggo
12. R.M.A Arjo Koesoemodipoetro, Regent di Sitoebondo
13. R.T Arjo Achmad Djajaningrat, Regent Serang

Kalau ketiga belas calon tersebut dibagi berdasarkan jabatan dan kedudukan akan terbagi sbb: lima bupati, tiga guru, dua dokter, satu Ajun Inspektur Sekolah, satu pangeran serta satu arsitek. Dari sudut usia, Tjipto pada usia 22 tahun merupakan yang termuda, Dwidjosewojo sekitar 40 tahun, Sosrosoegondo kira-kira 37 tahun dan Tirtakoesoemo tidak kurang dari 47 tahun. Anggota pengurus tertua ialah Dr. Wahidin, kira-kira 50 tahun. Akhirnya konggres menetapkan Pengurus Besar (Pusat) Budi Utomo dengan susunan pengurus sebagai berikut:

1. Ketua : R. Toemenggung Ario Tirtokoesoemo, Bupati Karang Anyar
2. Wakil Ketua : Mas Soediro Hoesodo, dokter pensiunan dari Yogyakarta
3. Sekertaris I : Mas Ngabei Dwidjosewojo, guru bahasa Jawa di SPG pribumi Yogyakarta
4. Sekertaris II : R. Sosrosegondo, guru bahasa Melayu di SPG Yogyakarta

5. Bendahara : R. M Pandji Gondoatmodjo mantan letnan Legium Pakualaman Yogyakarta
6. Komisaris : 1. R. M Ario Soerjodipoetro, Jaksa Kepala Bondowoso
2. R. M Pandji Gondosoemarjo, Jaksa Kepala di Solo
3. R. Djojosebroto, Jaksa di Garut
4. Mas Tjipto Mangoenkoesoemo, dokter Demak

Seperti bisa diharapkan, kepengurusan berada di tangan golongan tua dan bangsawan tinggi [Drs. Sudiyo, 1989: 17]. Sebagai ketua terpilih Raden Ario Tirtakoesoemo, Regent Karanganyar. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kebijaksanaan para senior untuk mencari jalan tengah. Tirtakoesoemo, adalah lulusan Pertanian di Bogor. Kemudian menjadi Asisten Wedono di Karesidenan Kedu, Jaksa Kepala di Magelang pada tahun 1882, kemudian pada tahun 1903 menjadi Bupati Karang Anyar. Tirtakoesoemo, adalah pejabat pemerintah yang terkemuka dan dikenal oleh kalangan luas.

Para senior nampaknya menghendaki ketuanya dari Bupati, artinya Budi Utomo hendaknya menjadi perkumpulan yang diminati oleh pejabat-pejabat pemerintahan dan bisa mengayomi masyarakat luas pada umumnya. Demikian pula Tirtakoesoemo mampu menjalin kerjasama dengan beberapa Bupati yang tidak menyenangi atas berdirinya Budi Utomo. Kalangan tua menjadi puas atas terpilihnya Tirtakoesoemo semata-mata karena berarti bahwa bupatilah yang menduduki jabatan ketua. Di lain pihak Tirtakoesoemo juga tidak menghalangi ketika Dr. Wahidin Soedirohoesoedo menyuarkan cita-citanya melalui majalah Retno Dhumilah, maupun saat beliau melakukan safari ke pelosok tanah Jawa dalam rangka mengaplikasikan gagasannya.

Sedang dari angkatan muda memandang Tirtakoesoemo sebagai seorang yang berfikiran maju dan otodidak, juga bukan berasal dari priyayi luhur. sehingga diharapkan bisa memahami kebutuhan rakyat ketimbang siapapun dari para bangsawan lain yang kolot. Dengan demikian Tirtakoesoemo dapat diterima dari berbagai pihak.

Adapun penggagas organisasi dan yang segera surut peranannya, yaitu dr Wahidin Soedirohoesodo, hanya sebagai wakil ketua [Drs. Suratmin, 1982: 74]. Sebagai sekertaris dipilih Dwidjosewojo, pelopor usaha asuransi jiwa bersama Bumiputra. Belakangan, mungkin untuk mencegah perpecahan, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soerjodipoetro, dua tokoh yang radikal, diminta juga jadi anggota pengurus sebagai komisaris.

Hal tersebut diatas menjadi modal utama BO dalam menjalankan roda perkumpulan, karena BO adalah organisasi modern yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Secara terperinci mengenai Anggaran Dasar BO dapat dibaca pada lampiran. Namun demikian Anggaran Dasar yang telah dibahas dan disyahkan dalam kongres itu baru diakui Pemerintah sebagai Badan Hukum dengan Keputusan Pemerintah No. 52 tanggal 28 Desember 1909. Izin inilah antara lain yang menjadi kendala bagi Tirtakoesoemo dalam melaksanakan kegiatannya.

Beberapa bulan sesudah kongres, Pengurus Besar berhasil menyelesaikan rumusan program BO dan baru dapat diumumkan pada akhir tahun 1908. Hal tersebut juga merupakan kendala bagi Tirtakoesoemo karena waktu tersita untuk menyelesaikan pengakuan atau izin dari Pemerintah dan kesibukan merumuskan Program organisasi. Program organisasi BO tersusun, sebagai berikut [Akira Nagazumi, 1989: 85]:

- a. Permohonan kepada Pemerintah:
 1. Menyempurnakan pendidikan di Kweekschool dan STOVIA
 2. Mempertahankan mutu pendidikan di STOVIA
 3. Mendirikan sekolah-sekolah Frobel untuk anak-anak pribumi laki-laki dan perempuan, membuka pintu sekolah dasar Eropa bagi anak-anak pribumi atau mendirikan sekolah pribumi serupa dengan sekolah Belanda dan Cina
 4. Mendirikan sekolah dagang pribumi, termasuk untuk kaum perempuan
 5. Menyediakan lebih banyak tanah untuk sekolah pertanian
 6. Memberikan beasiswa bagi murid-murid pribumi
 7. Memberikan izin penyelenggaraan undian untuk dana beasiswa

8. Memberikan izin bagi BO untuk mendirikan sekolah-sekolah desa
- b. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan:
1. Mendirikan sekolah-sekolah perempuan sebanyak-banyaknya
 2. Mendirikan yayasan untuk menyantuni peminta-minta tua dan muda
 3. Berjuang melawan riba
 4. Membuka perpustakaan rakyat
 5. Menggunakan sebagian anggaran untuk beasiswa pribumi
 6. Sebuah program dicantumkan untuk memulihkan ujian masuk STOVIA, sehingga tidak lagi diserahkan kepada kebijakan residen.

Tantangan terbesar bagi Tirtakoesoemo adalah bagaimana melaksanakan program-program tersebut dengan suatu organisasi yang baru lahir dengan didampingi oleh para priyayi elit yang tidak biasa bekerja dalam perkumpulan sosial apalagi di dalamnya ada person yang tidak memiliki visi yang sama. Hal tersebut menjadikan kedongkolan kelompok radikal dalam BO agaknya makin menjadi-jadi, setelah ternyata Raden Ario Tirtokoesoemo tidak mampu bersikap jelas terhadap banyak masalah. Akibatnya sebulan sebelum konggres kedua Tjipto dan Soerjodipoetro mengundurkan diri dari kepengurusan BO. Namun demikian, sebagai anggota mereka terus berjuang menjadikan BO organisasi kebangsaan untuk seluruh Hindia-Belanda.

Tak ayal lagi BO mulai mengalami kemerosotan, hal bukan disebabkan oleh pemerintah akan tetapi karena kelemahannya sendiri. Salah satu kelemahan terpenting adalah ketakutan bangsawan tinggi terhadap derasnya “demokratisasi” dalam BO. Beberapa hari setelah konggres pertama, sejumlah bupati telah menyerukan agar dibentuk organisasi khusus untuk para bupati. Kelemahan lain yang penting adalah keuangan. Sumber keuangan BO adalah iuran anggota dan semakin lama iuran semakin susah masuk. Karena kesulitan ini, akhir September 1909 pengurus pusat memutuskan untuk memberi kebebasan kepada cabang mengurus diri sendiri. Permohonan agar diberi izin melaksanakan lotere juga ditolak oleh pemerintah.

Bagaimanapun keterbatasan BO baik dalam program maupun dalam anggaran dasarnya berusaha memberi rumusan umum mengenai tujuan BO.

Ditegaskan, BO dibentuk “untuk sekuat tenaga merapatkan barisan kaum Bumiputra demi tercapainya Persatuan Rakyat Jawa (dan Madura) sebagai pelopor dalam perkembangan yang serasi bagi tanah air dan rakyat Hindia-Belanda”. Meskipun kesadaran nasional pasti telah tumbuh dalam hati para pendiri dan pendukung BO, akan tetapi dalam perumusan tujuan dan azas tidak tercantum “Kemerdekaan Nusa dan Bangsa”.

Pergerakan BO dalam taraf pertama memang bukan pergerakan politik dan keanggotaannya juga masih terbatas pada suku Jawa dan Madura. Oleh karena itu pengertian “kemerdekaan nusa dan bangsa “ dirasakan tidak sesuai dengan suasana pada waktu itu. Tujuan yang diutamakan ialah: memajukan dan membina syarat untuk mencapai kemerdekaan. Hal inilah yang memberikan martabat bagi pergerakan BO sebagai perintis kebangkitan nasional, betapapun pergerakan itu akhirnya mundur karena pengaruh keadaan dan perkembangan zaman. Lima tahun pertama BO benar-benar merupakan kancah atau muara keinginan-keinginan untuk bergerak maju dapat disalurkan, tempat kebaktian kepada bangsa dapat dinyatakan. Medan geraknya tidak ada yang membatasi, kegiatannya belum ada yang menandingi. Organisasi BO berkembang dan maju pesat sekali, pada akhir tahun 1909 telah mempunyai 40 cabang dengan lebih kurang 10.000 anggota. Ditambahkan pula, BO akan “membantu sekuat tenaga usaha lain yang serupa”. Peningkatan pendidikan, pertanian, perdagangan dan industri; menggairahkan kegiatan kesenian dan ilmu pengetahuan di kalangan Bumiputra; menjunjung tinggi cita-cita luhur kemanusiaan dan mengorbankan apa pun juga demi menjamin tegaknya kehidupan rakyat yang bermartabat.

BAB V

KOLEKSI MUSEUM SEBAGAI REFERENSI SEJARAH

Menurut ICOM (International Council Of Museum) yang dimaksud dengan Museum adalah suatu badan atau lembaga tetap, yang tidak mencari keuntungan, yang bertugas untuk menghimpun, merawat, meneliti, dan menyajikan untuk kepentingan studi dan kenikmatan, setiap benda pembuktian alam, manusia dan kebudayaan. Hal ini berarti museum merupakan suatu lembaga tetap yang memelihara dan memamerkan koleksinya yang terdiri dari benda-benda bermakna kebudayaan maupun ilmu pengetahuan, untuk kepentingan studi, pendidikan dan penikmatan. Dari sini dapat dilihat bahwa inti dari sebuah museum adalah koleksi. Koleksi museum berguna bagi kepentingan studi dan pendidikan. Melalui tata cara penyajian tertentu dengan ditunjang oleh penjelasan yang baik, pengunjung akan lebih mengerti akan maksud pameran tersebut. (Sufwandi Mangkudilaga, 1997/1998)

Sebagai museum khusus sejarah perjuangan nasional Museum Benteng Vredeburg bertugas mengumpulkan, menyimpan, merawat, meneliti, dan mengkomunikasikan benda-benda bernilai sejarah kepada masyarakat. Benda-benda tersebut setelah menjadi bagian dari museum selanjutnya disebut koleksi museum. Secara garis besar benda-benda yang kemudian menjadi koleksi museum sebelum dikomunikasikan harus diadakan pengkajian terlebih dahulu sehingga informasi yang diperoleh dari koleksi tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai museum khusus sejarah perjuangan nasional dapat disebut sebagai "*Jendela Jaman*", karena koleksi-koleksi yang dipamerkan merupakan benda-benda peninggalan (wakil) dari sebuah jaman yang diwakili oleh satu peristiwa tertentu. Sehingga dengan mengadakan pengamatan dari satu buah koleksi yang secara kronologis menunjukkan dalam satu temporal tertentu, berarti pengunjung telah melihat pada satu jaman tertentu.

Terkait dengan pemikiran tersebut maka dalam kegiatan ini berusaha mengkorelasikan sejarah Organisasi Budi Utomo dengan koleksi Museum Benteng

Vredeburg Yogyakarta yang terkait. Adapun data dari koleksi-koleksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diorama Adegan Kongres Budi Utomo I di Yogyakarta

Bentuk : Bagian depan persegi panjang, bagian belakang berbentuk setengah lingkaran bulat.

Fungsi : Sebagai media visualisasi tentang suasana kongres Budi Utomo I di Yogyakarta di ruang makan kweekschool Jetis (sekarang SMA 11 YK) Jl. A.M. Sangaji Yogyakarta.

Bahan : Kaca, Fiber glass, aluminium, dan kayu

Jumlah : 1 buah

Ukuran : Panjang 150 cm, lebar 180 cm, dan tinggi 200 cm

Keadaan : Baik.

Tempat : Ruang Diorama I, Gedung M3 Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta

Keterangan : Adegan tersebut menceritakan ketika dilaksanakan Kongres Budi Utomo I di Yogyakarta di ruang makan Kweekschool (sekarang SMU 11 Yogyakarta) Jl. A.M. Sangaji Yogyakarta. Berlangsung pada tanggal 3 – 5 Oktober 1908 di buka secara resmi pada pukul 21.00. Jumlah peserta yang hadir kurang lebih 300 orang diantaranya terdapat 20 orang dari organisasi wanita. Sebagai ketua panitia kongres adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kongres Budi Utomo menetapkan antara lain :

- a. Tujuan perkumpulan ialah mengusahakan kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, tehnik, industri dan kebudayaan.
- b. Menetapkan Ketua pengurus besar yang pertama yaitu KRT. Tirto Koesoemo (Bupati Karang Anyar). Anggota pengurus besar terdiri dari Pegawai Negeri atau bekas Pegawai Negeri.

c. Menetapkan Yogyakarta sebagai Pusat Perkumpulan Budi Utomo.

2. Foto SMU 11 Yogyakarta (Dulu Kweekschool)

Bentuk : Persegi Panjang

Fungsi : Media visualisasi tentang informasi peranan gedung Smu 11 Yogyakarta sebagai gedung bekas tempat dilaksanakannya kongres Budi Utomo I di Yogyakarta.

Bahan : Kertas, kayu, Kaca.

Jumlah : 1 buah

Ukuran : Panjang 50 cm, Lebar 40 cm.

Keadaan : Baik.

Tempat : Di Storage K1

Keterangan : Salah satu ruang (ruang makan) di kompleks gedung tersebut pernah dipergunakan sebagai tempat berlangsungnya kongres Budi Utomo I yang berlangsung tanggal 3 s.d. 5 Oktober 1908.

3. Patung Dada Dokter Wahidin Soediro Hoesodo

Bentuk : Patung Dada (Torso) lengkap dengan fustuknya

Fungsi : Sebagai media visualisasi tokoh nasional pemimpin kongres Budi Utomo I di Yogyakarta, dan sekaligus sebagai pelopor berdirinya organisasi Budi Utomo.

Bahan : Perunggu, dan kayu jati

Jumlah : 1 Buah

Ukuran : panjang 40 cm, lebar 40 cm, tinggi 60 cm

Keadaan : baik

Tempat : Di Museum Perjuangan Yogyakarta (Museum Benteng Vredeburg unit II)

Keterangan : Wahidin Soediro Hoesodo adalah seorang tokoh pencetus ide lahirnya Boerdi Oetomo 1908. Beliau lahir pada 7 Januari 1852 di Mlati, Sleman, Yogyakarta dan wafat pada 26 Mei 1917 dan

dimakamkan di Mlati, Sleman , Yogyakarta. Semasa hidupnya, tahun 1895 bersama rekan-rekannya mendirikan Surat Kabar dua bahasa (Jawa dan Melayu) Retno Dumilah di Yogyakarta. Pada tahun 1906 s.d. 1907 giat melaksanakan perjalanan mengumpulkan Studiefonds (Dana Pendidikan) bagi penduduk pribumi. Setelah bertemu dengan Sutomo seorang pelajar STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), berpadulah gagasan mereka yang teraktualisasi dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Wahidin Soediro Hoesodo beristri seorang wanita Betawi yang bernama Anna. Dari perkawinannya lahirlah dua orang anak. Salah satunya bernama Abdullah Subroto yang kemudian menurunkan Sujono Abdullah dan Basuki Abdullah (keduanya pelukis).

4. Patung Dada Dr. Sutomo

Bentuk : Patung dada (Torso) berbahan perunggu

Fungsi : Sebagai media visualisasi tentang tokoh Budi Utomo yang hadir dan berbicara di saat kongres Budi Utomo I di Yogyakarta tanggal 3 s.d. 5 Oktober 1908

Bahan : Perunggu dan kayu jati

Jumlah : 1 buah

Ukuran : Panjang 40 cm, lebar 40 cm, tinggi 60 cm

Keadaan : baik

Tempat : Museum Perjuangan Yogyakarta (Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Unit II)

Keterangan : Soetomo adalah seorang tokoh, ketua pertama Organisasi Boedi Oetomo. Beliau lahir di Ngepeh, Jawa Timur 30 Juli 1888 dengan nama Subroto dan wafat di Surabaya 30 Mei 1938. Sebagai mahasiswa STOVIA masuk pada 10 Januari 1903 dan tamat 11 April 1911. Bersama rekan-rekannya Goenawan, Soeradji, Goembrek dll, Beliau mendirikan Organisasi Boedi

Oetmo pada 20 Mei 1908. Pemuda Sutomo merupakan pelajar pertama yang merespon ajakan Dokter Wahidin Soediro Hoesodo untuk mendirikan Budi Utomo bersama-sama dengan para pelajar Stovia lainnya. Tahun 1919 Soetomo berkesempatan belajar ke Negeri Belanda, Jerman dan Austria. Di Negeri Belanda Soetomo menjadi anggota Indische Vereeniging (yang kemudian berubah menjadi Indonesische Vereeniging dan kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia). Setelah ke Indonesia menganjurkan agar Boedi Oetomo bergerak dalam dunia politik dan organisasinya terbuka untuk umum.

5. Patung Dada (Torso) KRT Tirto Koesoemo

Bentuk : Patung Dada (Torso)

Fungsi : Sebagai media visualisasi tentang tokoh yang terpilih sebagai Pemimpin Perkumpulan Budi Utomo dalam Kongres Budi Utomo I di Yogyakarta tanggal 3 - 5 Oktober 1908.

Bahan : Perunggu, kayu jati

Jumlah : 1 buah

Ukuran : Panjang 40 cm, lebar 40 cm, tinggi 60 cm

Keadaan : Baik

Tempat : Storage K2

Keterangan : Tirto Koesoemo adalah seorang Bupati dari Karang Anyar yang terpilih sebagai Ketua Budi Otomo pada periode 1908 – 1911, sedangkan wakilnya adalah Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Pada masa kepemimpinan Tirto Koesoemo Budi Utomo telah menempuh berbagai kegiatan antara lain : *Pertama*, penerbitan majalan Guru Desa. *Kedua*, Perubahan pelajaran bahasa Belanda di Sekolah Dasar. (semula di diajarkan di kelas 3, pada masanya diajarkan di kelas 1). *Ketiga*, Pada bulan Pebruari 1909 telah disebarakan 2.000 eksemplar laporan kongres pertama di seluruh Jawa dan Madura.

6. Foto Dr. Wahidin Soedirohoesodo

Bentuk : Persegi panjang

Fungsi : Media visualisasi tokoh pelopor berdirinya Budi Utomo dan pemimpin kongres pertama Budi Utomo dan sekaligus tampil sebagai pembicara tanggal 3 s.d. 5 Oktober 1908.

Bahan : Kertas, Kayu, Kaca

Jumlah : 1 buah

Ukuran : Panjang 50 cm, lebar 40 cm

Keadaan : Baik

Tempat : Storage K1

Keterangan : Wahidin Soediro Hoesodo adalah seorang tokoh pencetus ide lahirnya Boedi Oetomo 1908. Beliau lahir pada 7 Januari 1852 di Mlati, Sleman, Yogyakarta dan wafat pada 26 Mei 1917 dan dimakamkan di Mlati, Sleman, Yogyakarta. Semasa hidupnya, tahun 1895 bersama rekan-rekannya mendirikan Surat Kabar dua bahasa (Jawa dan Melayu) Retno Dumilah di Yogyakarta. Pada tahun 1906 s.d. 1907 giat melaksanakan perjalanan mengumpulkan Studiefonds (Dana Pendidikan) bagi penduduk pribumi. Setelah bertemu dengan Sutomo seorang pelajar STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), berpadulah gagasan mereka yang teraktualisasi dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Wahidin Soediro Hoesodo beristri seorang wanita Betawi yang bernama Anna. Dari perkawinannya lahirlah dua orang anak. Salah satunya bernama Abdullah Subroto yang kemudian menurunkan Sujono Abdullah dan Basuki Abdullah (keduanya pelukis).

7. Foto Dr. Sutomo

Bentuk : Persegi panjang

Fungsi : Visualisasi tokoh pendiri Budi Utomo dan juga hadir dan sebagai pembicara dalam kongres Budi Utomo I di Yogyakarta tanggal 3 s.d. 5 Oktober 1908
 Bahan : Kaca, Kayu, Kaca
 Jumlah : 1 Buah
 Ukuran : Panjang 50 cm, lebar 40 cm
 Keadaan : Baik
 Tempat : Storage K1
 Keterangan : Soetomo adalah seorang tokoh, ketua pertama Organisasi Boedi Oetomo. Beliau lahir di Ngepeh, Jawa Timur 30 Juli 1888 dengan nama Subroto dan wafat di Surabaya 30 Mei 1938. Sebagai mahasiswa STOVIA masuk pada 10 Januari 1903 dan tamat 11 April 1911. Bersama rekan-rekannya Goenawan, Soeradji, Goembrek dll, Beliau mendirikan Organisasi Boedi Oetmo pada 20 Mei 1908. Pemuda Sutomo merupakan pelajar pertama yang merespon ajakan Dokter Wahidin Soediro Hoesodo untuk mendirikan Budi Utomo bersama-sama dengan para pelajar Stovia lainnya. Tahun 1919 Soetomo berkesempatan belajar ke Negeri Belanda, Jerman dan Austria. Di Negeri Belanda Soetomo menjadi anggota Indische Vereeniging (yang kemudian berubah menjadi Indonesische Vereeniging dan kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia). Setelah ke Indonesia menganjurkan agar Boedi Oetomo bergerak dalam dunia politik dan organisasinya terbuka untuk umum.

8. Foto KRT. Tirto Koesoemo

Bentuk : Persegi Panjang
 Fungsi : Sebagai media visualisasi tentang tokoh yang terpilih sebagai Pemimpin Perkumpulan Budi Utomo dalam Kongres Budi Utomo I di Yogyakarta tanggal 3 - 5 Oktober 1908.
 Bahan : Kaca, Kayu, Kertas

Jumlah : 1 Buah
Ukuran : Panjang 50 cm, Lembar 40 cm
Keadaan : Baik
Tempat : Museum Perjuangan Yogyakarta (Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Unit II)
Keterangan : Tirta Koesoemo adalah seorang Bupati dari Karang Anyar yang terpilih sebagai Ketua Budi Otomo pada periode 1908 – 1911, sedangkan wakilnya adalah Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Pada masa kepemimpinan Tirta Koesoemo Budi Utomo telah menempuh berbagai kegiatan antara lain : *Pertama*, penerbitan majalan Guru Desa. *Kedua*, Perubahan pelajaran bahasa Belanda di Sekolah Dasar. (semula di diajarkan di kelas 3, pada masanya diajarkan di kelas 1). *Ketiga*, Pada bulan Pebruari 1909 telah disebarkan 2.000 eksemplar laporan kongres pertama di seluruh Jawa dan Madura.

9. Foto Kongres Budi Utomo I di Yogyakarta tanggal 3 s.d. 5 Oktober 1908

Bentuk : Persegi Panjang
Fungsi : Dokumentasi sejarah peristiwa berlangsungnya kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta tanggal 3 s.d. 5 Oktober 1908
Bahan : Kayu, Kaca, dan Kertas
Jumlah : 1 buah
Ukuran : Panjang 50 cm, lebar 40 cm
Keadaan : Baik
Tempat : Storage K1
Keterangan : Pembicaraan mengenai kongres pertama Boedi Oetomo dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1908 antara Dr. Wahidin Soedirohoesodo dengan pengurus Boedi Oetomo di Gedung STOVIA. Hasil pertemuan tersebut disepakati antara lain memilih Dr. Wahidin Soedirohoesodo sebagai pimpinan Kongres dan kota Yogyakarta sebagai tempat kongres. Dipilihnya kota

Yogyakarta sebagai tempat kongres dengan alasan sebagai berikut :

1. Yogyakarta adalah kota tempat tinggal Dr. Wahidin Soedirohoesodo;
2. Yogyakarta atau Mataram merupakan lambang kesatuan Jawa;
3. Sebagai pernyataan hormat dan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pangeran Noto Dirodjo (Paku Alam).

Kongres di buka dengan resmi tanggal 3 Oktober 1908 jam 21.00 WIB dan berlangsung hingga tanggal 5 Oktober 1908 bertempat di gedung Kweekshool, Jetis Yogyakarta (sekarang SMU 11 Yogyakarta). Kongres dihadiri kurang lebih 400 peserta, diantaranya 20 orang wanita. Utusan kongres mewakili daerah Jakarta, Bogor, Magelang, Surabaya, Purbolinggo dan Yogyakarta. Kongres juga dihadiri oleh para pejabat Belanda, bangsawan Paku Alaman, para Bupati Temanggung, Blora dan Magelang. Hadir pula 6 opsir dari Legiun Mangkunegaran Solo. Untuk pertama kalinya bangsawan, priyayi tinggi dan menengah serta kaum intelek Jawa bangkit dan berkumpul untuk bersatu. Mereka telah dibangkitkan dan dipersatukan oleh para pemuda pelajar. Pembicara-pembicara utama dalam kongres tersebut antara lain :

1. R. Soetomo (STOVIA Weltevreden)
2. R. Saroso (Kweekschool Yogyakarta)
3. R. Kamargo (Hoofdenschool Magelang)
4. Dr. M.B Mangoenhoesodo (Surakarta)
5. M. Goenawan Mangoenkoesoemo (STOVIA Weltevreden)

Dalam kongresnya yang I di Yogyakarta, Boedi Oetomo telah berhasil memutuskan beberapa hal penting antara lain :

1. Tujuan perkumpulan ialah mengusahakan kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan

pengajaran, pertanian peternakan, perdagangan, teknik, industri dan kebudayaan.

2. Menetapkan ketua pengurus besar yang pertama yaitu RTA. Tirto Koesoemo (Bupati Karang Anyar) dan wakilnya Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Juga telah pula dibentuk pengurus besar yang beranggotakan antara lain :

- a. RTA. Tirto Koesoemo (Bupati Karanganyar)
- b. MB. Dwidjosewojo (Guru Kweekschool Yogyakarta)
- c. R. Koewatin Sosrosoegondo (Guru Kweekschool Yogyakarta)
- d. M. Tjipto Mangoenkoesoemo (Dokter dari Demak)
- e. M.B. Wahidin Soedirohoesodo (Dokter Pensiun Yogyakarta)
- f. RM. Aryo Surjodipoetro (Kepala Kejaksaan Bondowoso)
- g. RA. Danoekoesoemo (Bupati Magelang)
- h. RM. Pandji Gondoatmodjo (Paku Alaman)
- i. RM. Pandji Gondosenarjo (Kejaksaan Surakarta)

3. Menetapkan Yogyakarta sebagai pusat perkumpulan Boedi Oetomo

10. Foto Lambang Budi Utomo

Bentuk : Persegi Panjang

Fungsi : Data visual mengenai lambang Budi Utomo yang berdiri tanggal 20 Mei 1908.

Bahan : Kaca, Kayu, Kertas

Jumlah : 1 Buah

Ukuran : Panjang 50 cm, lebar 40 cm.

Keadaan : Baik

Tempat : Museum Perjuangan Yogyakarta (Museum Benteng Vredeburg Unit II)

Keterangan : Menggambarkan seekor burung terbang tinggi yang ingin mencapai sesuatu dengan tulisan BO. Busur panah melambangkan menuju cita-cita organisasi. Sayap kiri dan kanan berjumlah delapan melambangkan tahun 1908 dan ekor lima melambangkan bulan Mei.

10. Naskah-naskah kuno yang terkait dengan Dr. Soetomo dan organisasi pergerakan antara tahun 1923- an.

Bentuk : Naskah (surat berharga, surat, kartu pos, dll)

Fungsi : Dokumen sumber informasi terkait dengan tokoh Budi Utomo (Sutomo) dan organisasi pergerakan hasil fusi antara BU dan PBI (Partai Bangsa Indonesia) menjadi Parindra (Partai Indonesia Raya)

Bahan : Kertas

Jumlah : 36 bendel

Ukuran : -

Keadaan : Baik

Tempat : Storage K1

Keterangan : Dokumen-dokumen tersebut berisi tentang berita-berita, maupun materi komunikasi dari dan kepada Dr. Sutomo maupun kerabatnya. Isinya tentang perkembangan Parindra, keadaan sosial politik waktu itu, maupun gagasan-gagasan yang akan dimasukkan dalam surat kabar. Juga ada dokumen-dokumen yang berbentuk berita-berita lampau dalam surat kabar.

Demikian koleksi-koleksi Museum Benteng Vredeburg yang terkait dengan sejarah organisasi Budi Utomo. Koleksi-koleksi tersebut tidak akan bermanfaat apa-apa jika tidak dikomunikasikan kepada masyarakat umum. Bagaimana supaya koleksi tersebut dapat berkata-kata (telling story) maka harus diadakan penelitian (pengakajian) yang tentu saja harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Hal itu mengingat museum sebagai sumber informasi bagi siapa saja. Sehingga dengan

demikain dapat dikatakan bahwa koleksi museum merupakan referensi alternatif bagi generasi muda pada khususnya dan masyarakat umumnya untuk mengetahui perkembangan sejarah bangsa Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

Rasa kebangsaan berawal dari dalam diri pribadi tiap-tiap manusia tanpa disengaja dan menjadi ungkapan dari rasa harga diri. Hal ini berkembang dari rasa keluarga (satu dalam keluarga) selanjutnya menjadi rasa masyarakat (satu dalam masyarakat) kemudian menjadi rasa bangsa (satu dalam bangsa) dan bermuara pada rasa manusia (satu dalam hidup kemanusiaan). Rentetan jalinan rasa yang tumbuh dan berkembang dalam diri tiap manusia adalah sebuah kodrat (fitrah)-Nya, artinya ada di dalam diri tiap manusia tanpa kecuali.

Pertumbuhan dan perkembangan rasa kebangsaan bisa melemah serta menguat bergantung pada pendidikan yang diperoleh oleh tiap-tiap individu. Jalur pendidikan keluarga diperoleh di dalam sebuah rumah tangga. Jalur pendidikan masyarakat diperoleh dari masyarakat. Institusi keluarga menjadi faktor utama dan yang paling menentukan dalam tumbuh kembang rasa kebangsaan (dimulai dari rasa persamaan tempat tinggal, persamaan kepentingan dan persamaan tujuan). Dari rasa tersebut memunculkan adanya sikap toleransi, demokrasi, tenggang rasa, pengorbanan, pangabdian dan solidaritas serta kedisiplinan (mengutamakan kepentingan umum).

Pada awal abad 19 rasa senasib sepenanggungan (kebangsaan) rakyat Indonesia mulai tumbuh. Hal ini mendorong lahirnya organisasi “Budi Utomo” pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo adalah sebuah organisasi kaum muda terpelajar pertama dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Konggres pertama diselenggarakan di kota Yogyakarta, karena kota Yogyakarta memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Konggres pertama ini dimaksudkan untuk menata organisasi dan membahas konsep Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan. Secara eksplisit cita-cita Budi Utomo hanya menyentuh “Bangsa Jawa” saja akan tetapi melalui pendekatan historis-politis ditemukan bukti empiris bahwa ruang gerak

Budi Utomo ternyata berskala nasional dan menjadi tonggak bangkitnya nasionalisme Indonesia.

Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai museum khusus sejarah perjuangan bangsa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian koleksi bermaksud untuk memberikan informasi koleksi khususnya yang terkait dengan organisasi Budi Utomo (Sejarah dan Kongres I di Yogyakarta). Kiranya ketauladanan organisasi Budi Utomo senantiasa luwes untuk diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga masyarakat khususnya generasi penerus bangsa dapat mengetahui, mamahami dan menghayati perjuangan para pendahulu dalam membangun sebuah bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- AG. Pringgodigdo, Prof, Dr, Mr, *Ensiklopedi Umum*, (Cetakan Kesembilan) Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1991
- Akira Nagazumi, *Boedi Oetomo*, (Jakarta: Gramedia, 1989)
- , *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908 – 1918*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1989
- Hadisutjipto, S.Z. Drs., *Gedung STOVIA Sebagai Cagar Sejarah*, (Cetakan ke 4) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, 1997/1997
- Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jilid 4) PT. Intermedia, Jakarta.
- Imam Supardi, *Dr. Soetomo Riwayat Hidup dan Perjuangannya*, Jakarta: Djambatan, 1952.
- James R. Rush, *Opium To Java: Jawa Dalam Cengkeraman Bandar-Bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910*. (Jakarta: Mata Bangsa, 2000)
- L.M. Sitorus, S.H., *Sejarah Pergerakan Dan Kemerdekaan Indonesia*, Cetakan 3, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, 1988
- Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Cetakan V, (terjemahan Nugroho Notosusanto), Penerbit Universitas Indonesia (U.I. Pres), Jakarta, 1986
- M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993
- Moedjanto, G, Drs.M.A., *Indonesia Abad Ke 20 Jilid I Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati*, (Cetakan ke 3) Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992
- Mohamad Anas, *Bergerak Berdirilah Budi Utomo*, Jakarta: 2002
- Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*, Ceramah tanggal 3 Desember 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta, Yayasan Idayu, Jakarta, 1978.
- Parakirti T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, Buku I, PT. Grasindo, Jakarta, 1995
- Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan Indonesia Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991)
- Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme* Jilid II, Jakarta: PT. Gramedia, 1991.
- Sudiyo, Drs., *Perhimpunan Indonesia Sampai Dengan Lahirnya Sumpah Pemuda*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1989

- Sufwandi Mangkudilaga, Drs., *Arti Dan Peranan Museum Dalam Perkembangan Industri Kepariwisata*, Museografia Majalah Ilmu Permuseum, Jilid XXVI No. 1 Th. 1997/1998, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, 1997/1998
- Suhartono, D.R., *Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, (Cetakan I) Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994
- Suratmin. Drs, *Dr. Sutomo*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982
- Tim Penyusun, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976
- , *Sejarah Nasional Indonesia* Jilid VI .

PERPUSTAKAAN MUSEUM BENTENG VREDEBURG



1.161005584.01

PERPUSTAKAAN
VREDEBURG

